

## PETA KEMISKINAN INDONESIA: ASAL MULA DAN SIGNIFIKANSINYA

## THE POVERTY MAP OF INDONESIA: GENESIS AND SIGNIFICANCE



Upaya Penciptaan Peta Kemiskinan Wilayah Kecil di Indonesia <i>Efforts to Create a Small-Area Poverty Map in Indonesia</i>	3
Peta Kemiskinan Indonesia: Metode dan Implementasinya <i>A Poverty Map of Indonesia: Method and Implementation</i>	9
Verifikasi Peta Kemiskinan Melalui Metode Kuantitatif dan Metode Partisipatoris <i>Verification of the Poverty Map Using Quantitative and Participatory Methods</i>	15
Pemanfaatan Peta Kemiskinan Indonesia 2000 <i>Uses of the Poverty Map of Indonesia 2000</i>	22
Mengenang Wenefrida Dwi Widyanti: Jejakmu Tak Berkesudahan <i>Remembering Wenefrida Dwi Widyanti: An Everlasting Legacy</i>	28

Kondisi geografis dan sebaran penduduk Indonesia memunculkan berbagai persoalan bagi upaya penetapan kelompok sasaran program kemiskinan. Kenyataan ini melahirkan beberapa prakarsa untuk mengembangkan instrumen yang lebih efektif bagi penetapan sasaran kelompok miskin dan rentan secara akurat untuk program-program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Berangkat dari kebutuhan akan instrumen tersebut, pada 2001 Lembaga Penelitian SMERU mulai mengembangkan sebuah peta kemiskinan untuk seluruh Indonesia yang mencakup tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Pada 2003 SMERU menerbitkan hasil awal pemetaan kemiskinan yang diujicobakan di tiga provinsi dan hasil akhirnya yang mencakup 30 provinsi diterbitkan pada 2005.

Salah satu peneliti SMERU yang berperan besar dalam proses pengembangan peta ini adalah almarhumah Wenefrida Dwi Widyanti. Sebagai penghormatan atas karyanya, edisi ini secara khusus menyajikan sejarah, proses, dan hasil pemetaan kemiskinan untuk Indonesia.

Indonesia's geographical nature and population distribution create a number of problems for accurately targeting poverty programs. This has led to a number of initiatives to develop more effective instruments for accurately targeting poor and vulnerable groups for poverty reduction programs in Indonesia. Based on the need for these instruments, in 2001 The SMERU Research Institute started to develop a poverty map of Indonesia which covered the kabupaten (district), kecamatan (subdistrict), and village levels. In 2003 SMERU published the initial results of the poverty map which was piloted in three provinces and the final result, which covered 30 provinces, was published in 2005.

One SMERU researcher who had a significant role in the process of developing this poverty map was the late Wenefrida Dwi Widyanti. As a tribute to her work, this edition specifically presents the history, processes, and results of the poverty mapping of Indonesia.



**SMERU** adalah sebuah lembaga penelitian independen yang melakukan penelitian dan pengkajian kebijakan publik secara profesional dan proaktif, serta menyediakan informasi akurat, tepat waktu, dengan analisis yang objektif mengenai berbagai masalah sosial-ekonomi dan kemiskinan yang dianggap mendesak dan penting bagi rakyat Indonesia.

Melihat tantangan yang dihadapi masyarakat Indonesia dalam upaya penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, perbaikan sektor sosial, pengembangan demokrasi, dan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, maka kajian independen sebagaimana yang dilakukan oleh SMERU selama ini terus dibutuhkan.

*SMERU is an independent institution for research and policy studies which professionally and proactively provides accurate and timely information as well as objective analysis on various socioeconomic and poverty issues considered most urgent and relevant for the people of Indonesia.*

*With the challenges facing Indonesian society in poverty reduction, social protection, improvement in social sector, development in democratization processes, and the implementation of decentralization and regional autonomy, there continues to be a pressing need for independent studies of the kind that SMERU has been providing.*

#### DEWAN REDAKSI/EDITORIAL BOARD:

Sudarno Sumarto, Asep Suryahadi, Syaikhul Usman,  
Sri Kusumastuti Rahayu, Nuning Akhmedi, Widjajanti I. Suharyo

#### REDAKSI/EDITORIAL STAFF:

Editor/Editor: Liza Hadiz

Asisten Editor/Assistant Editors: R. Justin Sodo, Budhi Adrianto  
Penerjemah/Editor Bahasa Inggris/

English Translators/Editors: Kate Stevens, Zahra Matthews

Perancang Grafis/Graphic Designer: Novita Maizir

Distribusi/Distribution: Mona Sintia

Newsletter SMERU diterbitkan untuk berbagi gagasan dan mengundang diskusi mengenai isu-isu sosial, ekonomi, dan kemiskinan di Indonesia dari berbagai sudut pandang. Temuan, pandangan, dan interpretasi yang dimuat dalam Newsletter SMERU sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan di luar tanggung jawab SMERU atau badan penyanggah dana SMERU. Silahkan mengirim komentar Anda. Jika Anda ingin terdaftar dalam mailing list kami, kunjungi situs web SMERU atau kirim e-mail Anda kepada kami.

*The SMERU newsletter is published to share ideas and to invite discussions on social, economic, and poverty issues in Indonesia from a wide range of viewpoints. The findings, views, and interpretations published in the articles are those of the authors and should not be attributed to SMERU or any of the agencies providing financial support to SMERU. Comments are welcome. If you would like to be included on our mailing list, please visit our website or send us an e-mail.*

Lembaga Penelitian  
**SMERU**  
Research Institute

Jl. Pandeglang No. 30 Menteng,  
Jakarta 10310 Indonesia

Phone: 6221-3193 6336; Fax: 6221-3193 0850

e-mail: [smeru@smeru.or.id](mailto:smeru@smeru.or.id); website: [www.smeru.or.id](http://www.smeru.or.id)

## Pembaca yang Budiman,

Beberapa waktu lalu, Lembaga Penelitian SMERU dan para mitranya dikejutkan oleh kematian salah satu peneliti terkemukanya, Wenefrida Widyanti. Kepergiannya bukan saja merupakan kehilangan besar bagi SMERU karena peran signifikannya dalam berbagai penelitian SMERU, tetapi juga merupakan kehilangan besar bagi komunitas peneliti di Indonesia. Wenefrida, yang kerap disapa Wina oleh rekan-rekannya, adalah peneliti yang diakui luar biasa dalam hal keterampilan meramu angka dan dalam pengetahuan tentang data. Keahliannya terutama tercermin pada hasil kerjanya yang berjudul “Developing a Poverty Map for Indonesia: A Tool for Better Targeting in Poverty Reduction and Social Protection Programs” [Pengembangan Peta Kemiskinan Indonesia: Instrumen untuk Penetapan Sasaran yang Lebih Baik bagi Program Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial] yang diterbitkan SMERU dalam empat seri buku pada 2005. Chris Elbers dari Vrije University di Amsterdam, yang sempat bekerja sama dengan Wina dalam pembuatan peta kemiskinan Indonesia, menganggap Wina sebagai “empu dalam pengelolaan data dan pemrograman.” Peta kemiskinan yang dikembangkan SMERU ini telah dikemas dalam bentuk CD interaktif yang mudah digunakan.

Dalam edisi khusus kali ini kami ingin berbagi bersama pembaca karya utama almarhumah, yakni Peta Kemiskinan SMERU—asal usulnya, kontribusinya bagi studi terkait kemiskinan, dan pemanfaatannya oleh para pemangku kepentingan kami.

Edisi ini kami persembahkan kepada almarhumah Wina untuk mengenang kontribusinya kepada SMERU dan pengembangan analisis kemiskinan di Indonesia. Melalui buletin SMERU edisi ini kami mengajak para pembaca untuk bersama mengenang kehidupan Wenefrida Widyanti dan dampak kehadirannya dalam kehidupan mereka yang mengenalnya secara pribadi dan komunitas peneliti di Indonesia pada umumnya.

Selamat menikmati edisi khusus ini.

Liza Hadiz  
Editor

## Dear Readers,

*Recently The SMERU Research Institute and its close associates were shocked by the sudden death of one of the Institute's leading researchers, Wenefrida Widyanti. Her death was not only a great loss to the Institute, because she played a significant role in many of SMERU's research projects, but also for the Indonesian research community at large. Wenefrida, better known as Wina by her colleagues, was recognized for her exceptional number crunching skills and knowledge about data. Her expertise is best reflected in her work, “Developing a Poverty Map for Indonesia: A Tool for Better Targeting in Poverty Reduction and Social Protection Programs”, published in a series of four books by SMERU in 2005. Chris Elbers of Vrije University, Amsterdam, who had the opportunity to work with Wina in developing the poverty map of Indonesia, considered her as “a true master in data management and programming.” To date, the SMERU Poverty Map is presented in a form of an easy-to-use interactive CD.*

*In this special edition we would like to share with our readers Wina's major work, the SMERU Poverty Map—its genesis, contribution to poverty-related studies, and use by our stakeholders.*

*This edition is dedicated to the late Wina, to commemorate her contribution to SMERU and the development of poverty analysis in Indonesia. Through this newsletter edition, let us celebrate the life of Wenefrida Widyanti and all the differences she has made to the lives of those who knew her personally and the Indonesian research community in general.*

We hope you enjoy our special edition.

Liza Hadiz  
Editor

# UPAYA PENCIPTAAN PETA KEMISKINAN WILAYAH KECIL DI INDONESIA

## EFFORTS TO CREATE A SMALL-AREA POVERTY MAP IN INDONESIA

Asep Suryahadi & Sudarno Sumarto\*



Nuning Ahmadi/SMERU

Pengalaman pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial telah menunjukkan bahwa penetapan sasaran berbagai program tersebut—kelompok miskin dan kelompok rentan—merupakan persoalan yang paling menentukan dan sulit (Bigman dan Fofack 2000). Kendala wilayah geografis yang amat luas dan jumlah penduduk yang amat besar membuat penetapan sasaran masyarakat miskin di Indonesia menjadi lebih berat. Artikel singkat ini menyoroti upaya penyusunan peta kemiskinan untuk wilayah kecil di Indonesia, termasuk pengembangan Peta Kemiskinan Indonesia 2000 oleh Lembaga Penelitian SMERU. Dalam pengembangan peta tersebut, mendiang Wenefrida Widyanti, atau yang kerap disapa Wina oleh rekan-rekannya, memainkan peran yang sangat penting.

\* Asep Suryahadi dan Sudarno Sumarto adalah peneliti senior di Lembaga Penelitian SMERU.

*In the implementation of various poverty reduction and social protection programs, experience shows that locating the target for these programs—the poor and vulnerable groups—is one of the most crucial and difficult problems (Bigman and Fofack 2000). In Indonesia, a country which is very large in size and population, geographic targeting of the poor is even more difficult. This short article documents the efforts to create small-area poverty maps in Indonesia, including the development of the Poverty Map of Indonesia 2000 by the SMERU Research Institute, in which the late Wenefrida Widyanti, known as Wina by her friends, played a crucial role.*

\* Asep Suryahadi and Sudarno Sumarto are senior researchers at the SMERU Research Institute.

### Upaya Pemetaan Kemiskinan Terdahulu

Meski mayoritas penduduk Indonesia pada 1960-an dan 1970-an tergolong miskin, upaya penanggulangan kemiskinan belum pernah secara eksplisit dituangkan sebagai tujuan pembangunan dalam kelima tahapan rencana pembangunan lima tahun (Pelita I hingga V) antara 1969 dan 1994. Baru pada 1994, pada permulaan Pelita VI, pemerintah secara tegas mengidentifikasi sasaran upaya penanggulangan dan penghapusan kemiskinan.

Untuk mencapai sasaran ini, pemerintah menggunakan pendekatan langsung dan tidak langsung. Di antara berbagai upaya langsung yang telah diluncurkan, terdapat empat program utama, yakni: (i) Inpres Desa Tertinggal (IDT); (ii) Program Pembangunan Kesejahteraan Keluarga (Takesra/Kukesra); (iii) Program Peningkatan Pendapatan Petani dan Nelayan Kecil (P4K); dan (iv) Program kembar, yakni Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) (Sumarto et al. 1997).

Sebagai bagian dari rancangan program untuk mengidentifikasi kelompok sasaran, upaya pemetaan kemiskinan pun mulai dikembangkan. Secara khusus Program IDT dan Program Takesra/Kukesra memulai dua upaya utama pemetaan kemiskinan di wilayah-wilayah kecil. Program IDT berlangsung dari 1994 hingga 1997. Pendekatan penetapan sasaran yang dipakai dalam program IDT adalah dengan mengklasifikasi seluruh desa di Indonesia ke dalam desa miskin atau desa tertinggal dan bukan desa miskin. Hal ini menunjukkan bahwa program IDT lebih mengarah pada daerah miskin dan bukan penduduk miskin.

Berdasarkan Podes 1993, BPS menetapkan bahwa 20.622 desa, atau 31 persen dari seluruh desa di Indonesia, tergolong dalam desa miskin atau desa tertinggal. Dari seluruh desa miskin ini, 19.615 di antaranya berada di wilayah perdesaan dan 1.007 berada di perkotaan.

Terjadinya ketidaktercakupannya dan kebocoran dalam program jaring pengaman sosial selama krisis ekonomi menimbulkan kesadaran akan perlunya melakukan sensus kemiskinan.

*The undercoverage and leakage that occurred in the social protection programs during the economic crisis raised the awareness of the need to conduct a poverty census.*

### Past Poverty Mapping Efforts

*Although the majority of Indonesians in the 1960s and 1970s were poor, poverty reduction was never explicitly set as a development goal in the first five rounds of the 'Five Year Development Plan' (Pelita I to V) between 1969 and 1994. It was only in 1994, at the start of Pelita VI, that the government explicitly identified a target for the reduction and eventual elimination of poverty.*

*Direct and indirect approaches were used by government in the effort to achieve this target. Among the direct poverty reduction efforts launched, four of the major programs were: (i) The Presidential Instruction on Disadvantaged Villages (IDT); (ii) Family Welfare Development Program (Takesra/Kukesra); (iii) Income Generating Project for Marginal Farmers (P4K); and (iv) the twin Urban Poverty Reduction Program (P2KP) and Kecamatan Development Program (PPK) (Sumarto et al. 1997).*

*As part of the programs' designs to identify the target groups, efforts to map poverty in Indonesia were also initiated. In particular, the IDT and Family Welfare Development Program undertook the first two major efforts to map poverty in small areas. The IDT program ran from 1994 to 1997. The targeting approach used in the IDT program was to classify all villages in Indonesia into poor or "left behind" (tertinggal) villages and nonpoor villages. This meant that the IDT program targeted poor areas rather than poor people.*

*Based on the 1993 Podes, BPS determined that 20,622 villages, or 31 percent of all villages in Indonesia, were classified as poor or "left behind" villages. Of these poor villages, 19,615 were in rural areas and 1,007 were in urban areas.*



Sementara itu, Program Takesra/Kukesra yang dikelola oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mencoba untuk menetapkan sasaran rumah tangga miskin secara langsung. BKKBN mengklasifikasikan rumah tangga di Indonesia ke dalam lima kategori kesejahteraan: (i) Keluarga Pra Sejahtera atau KPS; (ii) Keluarga Sejahtera I atau KS I; (iii) KS II, (iv) KS III; dan (v) KS III+ (BKKBN 1994). Rumah tangga miskin sering disejajarkan dengan KPS, namun kadang-kadang batasannya meliputi KPS dan KS I.

Sebuah rumah tangga digolongkan sebagai rumah tangga KPS bila rumah tangga tersebut tidak mampu memenuhi salah satu dari lima syarat berikut (i) semua anggotanya menjalankan kewajiban ibadah sesuai agama yang dianutnya; (ii) semua anggotanya makan sedikitnya dua kali sehari; (iii) pakaian yang dipakai semua anggotanya berbeda saat bekerja, sekolah, dan kunjungan sosial; (iv) sebagian besar lantai tempat tinggalnya bukan tanah; dan (v) semua anggota rumah tangga yang sakit atau pengguna kontrasepsi dapat memanfaatkan layanan medis yang modern. Untuk mencapai status kesejahteraan tertinggi, yaitu KS III+, sebuah rumah tangga harus memenuhi 22 indikator.

Data ini kemudian digunakan untuk menetapkan sasaran dalam program jaring pengaman sosial (JPS) selama krisis ekonomi, mulai pada 1998, yang turut menyumbang pada kekurangcukupan dan kebocoran dalam pelaksanaan semua program tersebut (Sumarto et al. 2002). Hal ini berdampak pada timbulnya kesadaran akan perlunya melakukan sensus kemiskinan. Gagasan dasar sensus kemiskinan adalah bahwa rumah tangga dievaluasi berdasarkan status kemiskinan yang disandangnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data dasar rumah tangga yang lebih sesuai, daripada data dasar BKKBN, untuk penetapan sasaran bagi program penanggulangan kemiskinan.

Gagasan ini disampaikan kepada pemerintah provinsi. Dari 30 provinsi yang ada di Indonesia, hanya 3 provinsi—Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan Selatan—yang melaksanakan gagasan ini. Sensus kemiskinan di tiga provinsi ini dilakukan pada saat yang bersamaan dan dilakukan bersama-sama dengan Sensus Penduduk 2000. Akhirnya, BPS juga secara berkala menghitung statistik tingkat kemiskinan kabupaten/kota berdasarkan hasil Susenas Kor tahunan.

### Sebuah Metode Baru Pemetaan Kemiskinan

Idealnya penetapan sasaran geografis didasarkan pada deskripsi insiden kemiskinan dan indikator lain kesejahteraan ekonomi di wilayah kecil atau pada tingkat administratif yang lebih rendah. Dalam konteks Indonesia, tingkat pengelolaan administrasi dimulai dari tingkat nasional, dan menurun ke tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan.

Informasi tingkat desa mengenai distribusi kesejahteraan ekonomi dapat diperoleh dengan melakukan survei rumah tangga yang representatif di tingkat desa. Akan tetapi, dengan jumlah sekitar 80.000 desa di Indonesia, survey seperti itu terlampaui besar dan mahal.

*Meanwhile, the Family Welfare Development Program, which was managed by the National Family Planning Coordinating Board (BKKBN), tried to target poor households directly. The BKKBN classified all households in Indonesia into five welfare categories: (i) Pre-Prosperous Households (Keluarga Pra Sejahtera or KPS); (ii) Prosperous Households Level I (Keluarga Sejahtera I or KS I); (iii) KS II, (iv) KS III; and (v) KS III+ (BKKBN (1994). Poor households are often equated with KPS households, but are sometimes defined to include KPS and KS I households.*

*A household is classified as a KPS household if it fails any of the following five conditions: (i) all household members practice their religious obligations; (ii) all household members eat at least twice a day; (iii) all household members have different sets of clothing for work, school, and social visits; (iv) the largest area of floor in the house is not made of earth; and (v) sick household members and contraceptive users use modern medical services. To reach the highest welfare status of KS III+, a household has to pass a total of 22 indicators.*

*This data was later used in the targeting of social safety net programs during the economic crisis starting in 1998, which partially contributed to undercoverage and leakage in the implementation of these programs (Sumarto et al. 2002). This has led to awareness of the need to conduct a "poverty census". The main idea of the poverty census is that households are assessed by their poverty status. The purpose is to have a household database more suitable for targeting poverty reduction programs than the existing BKKBN database.*

*This idea was promoted to the provincial governments. Out of the 30 provinces in Indonesia, only 3 provinces—Jakarta, East Java, and South Kalimantan—implemented the idea. The poverty censuses in these three provinces were conducted at the same time and in conjunction with the Population Census 2000. Finally, BPS has also regularly calculated district level poverty statistics based on the annually-collected Core Susenas.*

### A New Poverty Mapping Method

*Ideally, geographic targeting should be based on a description of poverty incidence and other indicators of economic welfare in small areas or at low administrative levels. In the context of Indonesia, administrative levels start from the national level, and descend to the provincial (propinsi), district/city (kabupaten/kota), subdistrict (kecamatan), and village (desa/kelurahan) levels.*

*One could of course obtain village-level information on the distribution of economic welfare by carrying out a household survey representative at the village level. However, with around 80,000 villages in Indonesia, such a household survey is too large and expensive to carry out.*

Sebagai hasil kemajuan pengembangan metodologi terbaru di bidang ini, sebuah metode baru telah dikembangkan untuk mengestimasi distribusi kesejahteraan ekonomi di wilayah kecil dengan menggunakan data statistik yang biasanya telah tersedia di suatu negara (Elbers *et al.* 2001; 2002). Inti dari metode tersebut adalah penggabungan informasi yang diperoleh dari survei rumah tangga dengan sensus penduduk.<sup>1</sup>

Metode ini berhasil dilakukan di negara lain, khususnya di Afrika Selatan dan Ekuador. Penerapan awal metode ini menunjukkan bahwa metode tersebut dapat dilakukan apabila sumber-sumber data yang diperlukan tersedia. Hasilnya menunjukkan bahwa galat standar penghitungan untuk statistik wilayah kecil cukup dapat diterima. Akhirnya, hasil pemetaan ini sangat bermanfaat bagi beragam tujuan. Contoh-contoh keberhasilan ini telah mendorong penerapan metode tersebut secara lebih luas di negara-negara lain, termasuk di Indonesia.

### Studi Uji Coba

Di Indonesia, metode baru pemetaan kemiskinan—yang populer disebut sebagai “metode Bank Dunia”—diperkenalkan kepada masyarakat luas yang meliputi para pengambil keputusan, ahli statistik, akademisi, peneliti, dan masyarakat umum dalam sebuah seminar yang diselenggarakan oleh BPS pada Juni 2001. Pembicara pada seminar tersebut adalah Peter Lanjouw dari Bank Dunia, yang menyoroti fitur metodenya, contoh-contoh penerapannya di negara-negara lain, dan menggambarkan beberapa pemanfaatan peta kemiskinan yang telah dihasilkan.

*As a result of recent methodological advances in this area, a new method has been developed to estimate the small area distribution of economic welfare, using statistical data collections normally available in a country (Elbers *et al.* 2001; 2002). The core of the method is to combine the information obtained from household surveys with the population census.<sup>1</sup>*

*This method has been successfully implemented in other countries, in particular in South Africa and Ecuador. These early applications of the method have shown that the method can be implemented given the required data sources are available. The results indicate that the standard error of the estimations for small area statistics is reasonably acceptable. Finally, the resulting maps have been found to be very useful for various purposes. These successful examples have encouraged wider application of the method in other countries, including Indonesia.*

### The Pilot Study

*In Indonesia, the new poverty mapping method—popularly known as the “World Bank method”—was introduced to a large audience of policy makers, statisticians, academics, researchers, and the general public in a seminar held in BPS (Statistics Indonesia) in June 2001. The speaker at the seminar was Peter Lanjouw from the World Bank, who highlighted the features of the method, provided examples of its application in other countries, and illustrated some of the uses of the poverty maps that had been produced.*

Sebuah metode baru pemetaan kemiskinan untuk wilayah kecil telah diterapkan di Indonesia sejak 2001 dengan menggunakan data statistik yang menggabungkan informasi yang diperoleh dari survei rumah tangga dan sensus penduduk.

*A new method of poverty mapping of small areas has been applied in Indonesia since 2001 which uses a combination of statistical information obtained from household surveys and the population census.*



SMERU

<sup>1</sup> Uraian lengkap metode ini secara singkat dibahas dalam artikel yang ditulis oleh Chris Elber pada edisi ini.

<sup>1</sup> The detail of this method is briefly discussed in an article by Chris Elber in this edition of newsletter.

Seminar tersebut menarik minat, setidaknya bagi beberapa peserta seminar, yang ingin menggunakan dan menerapkan metode tersebut di Indonesia. Dalam pertemuan tindak lanjut, tiga lembaga—BPS, Lembaga Penelitian SMERU, dan Bank Dunia—bersepakat bekerja sama mengupayakan penerapan metode tersebut dan mengembangkan peta kemiskinan untuk wilayah kecil di Indonesia. Tujuan utamanya adalah menciptakan peta kemiskinan dengan resolusi tinggi hingga ke tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa.

Hingga saat itu metode tersebut belum pernah diterapkan di sebuah negara besar. Karena itu, diputuskan bahwa rencana ini akan dibagi dalam dua fase. Fase pertama adalah fase studi uji coba, metodenya akan dipelajari dan kemudian diterapkan terbatas di tiga provinsi dari 30 provinsi yang ada di Indonesia. Tujuannya adalah untuk menguji kemungkinan penerapan metode tersebut, dengan ketersediaan data yang ada. Ketika studi uji coba ini dimulai pada 2001, data Sensus Penduduk 2000 belum tersedia. Karena itu, ketiga provinsi uji coba akan dipilih menurut ketersediaan data dasar yang ada. Ketiga provinsi yang terpilih adalah Kalimantan Timur, Jakarta, dan Jawa Timur berdasarkan urutan waktunya.

Dalam fase uji coba, SMERU memegang peranan utama sebagai lembaga pelaksana. BPS bertindak sebagai pendukung dengan menyediakan semua data yang diperlukan dan Bank Dunia menyediakan dana dan bantuan teknis. Fase uji coba ini dimulai pada Juli 2001 dan selesai 2 tahun kemudian pada Mei 2003.<sup>2</sup>

### Membuat Peta Kemiskinan untuk Seluruh Indonesia

Setelah studi uji coba tersebut, BPS meneruskan studi di provinsi lain dan menyusun sebuah peta kemiskinan untuk seluruh wilayah pada tingkat kecamatan. Dengan menggunakan metode yang sama dan menerapkannya pada indikator kesejahteraan lainnya, BPS telah dapat menghasilkan peta gizi buruk Indonesia.

Dalam peta kemiskinannya, BPS menggunakan garis kemiskinan resmi. Sementara itu, SMERU juga telah mengembangkan metode penghitungan garis kemiskinannya sendiri yang dipakai dalam kegiatan uji coba pemetaan kemiskinan. Karena itu, SMERU merasa perlu untuk mengembangkan sebuah peta kemiskinannya sendiri untuk seluruh Indonesia. SMERU mengajukan proposal kepada Ford Foundation melalui Prakarsa Penelitian Regional dalam Perlindungan Sosial di Asia untuk melanjutkan kegiatan pengembangan peta kemiskinan yang lengkap hingga ke tingkat desa.

Pada awal 2003 proposal SMERU disetujui Ford Foundation sehingga pekerjaan yang memerlukan kecermatan untuk mengembangkan peta kemiskinan untuk seluruh wilayah di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa mulai dilakukan. Pada akhirnya, dibutuhkan waktu 2 tahun untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.<sup>3</sup> Selama proses ini, almarhumah Wina adalah tokoh kunci di balik pekerjaan ini karena dia sendirilah yang melakukan estimasi ekonometrik yang diperlukan. Tanpa dedikasi almarhumah, Peta Kemiskinan Indonesia 2000 SMERU tidak akan pernah terwujud. ■

*The seminar sparked interest, at least among some participants of the seminar, who considered using and applying the method in Indonesia. In a follow up meeting, three institutions—BPS, the SMERU Research Institute, and the World Bank—came together and agreed to collaborate in an effort to apply the method and develop a small-area poverty map of Indonesia. The ultimate purpose was to create high resolution poverty maps down to the district (kabupaten), subdistrict (kecamatan), and village levels.*

*Until then, the method had never been applied in a large country. It was therefore decided that the effort would be divided into two phases. The first phase would be a pilot study, where the method would be studied and then applied to data from only three provinces of the total 30 provinces in Indonesia. The purpose of the pilot study was to test the feasibility of applying the method, given the available data in Indonesia. When the pilot study commenced in mid 2001, the 2000 Population Census data was not yet available. It was therefore decided that the three pilot provinces would be selected simply on the basis of data availability. The provinces for which the data was first available and which were hence included in the pilot study were East Kalimantan, Jakarta, and East Java, in chronological order.*

*In the pilot phase, SMERU took a leading role as the implementing agency. BPS supported the study by providing all the data and the World Bank provided funding and technical assistance. The pilot phase commenced in July 2001 and was accomplished 2 years later in May 2003.<sup>2</sup>*

### The Creation of a Complete Poverty Map of Indonesia

*Following on from the pilot study, BPS has continued the work on other provinces and create a poverty map of the whole country at the subdistrict level. Utilizing the same methodology and applying it to other welfare indicators, BPS has also produced a malnutrition map of Indonesia.*

*In its poverty map, BPS used the official poverty lines. Meanwhile, SMERU has also developed its own poverty line calculation method, which was used in the pilot poverty mapping work. SMERU therefore felt a need to develop a poverty map of its own for the whole country. SMERU submitted a proposal to the Ford Foundation's Regional Research Initiative on Social Protection in Asia to continue its work on developing a complete poverty map of Indonesia down to the village level.*

*In early 2003, the SMERU proposal was approved by the Ford Foundation, so the meticulous work of developing the poverty map for the whole country at the provincial, district, subdistrict, and village levels started. In the end it took 2 years to complete the work.<sup>3</sup> During this process, Wina played the most important role as she single-handedly did all the gruelling econometric estimations required in the work. Without her dedication, there would never be a SMERU Poverty Map of Indonesia 2000. ■*

<sup>2</sup> Laporan studi uji coba dapat dilihat pada Suryahadi et al. (2003)

<sup>3</sup> Laporan studi dapat dilihat pada Suryahadi et al. (2005).

<sup>2</sup> The report of the pilot study can be found in Suryahadi et al. (2003).

<sup>3</sup> The report of the study can be found in Suryahadi et al. (2005).

Daftar Acuan

- Bigman, David and Hippolyte, Fofack (2000) 'Geographical Targeting for Poverty Alleviation: An Introduction to the Special Issue' [Penetapan Sasaran Geografis untuk Pengentasan Kemiskinan: Pengantar Edisi Khusus] dalam *The World Bank Economic Review*, 14(1), hlm. 129-145
- BKKBN (1994) *Pembangunan Keluarga Sejahtera di Indonesia Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1992 dan GBHN 1993*. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
- Elbers, Chris, Jean O. Lanjouw, and Peter Lanjouw (2001) 'Welfare in Villages and Towns: Micro-Level Estimation of Poverty and Inequality' [Kesejahteraan dalam Desa dan Kota: Estimasi Tingkat Mikro terhadap Kemiskinan dan Ketimpangan]. Vrije Universiteit, Amsterdam, mimeo
- Elbers, Chris, Jean O. Lanjouw, and Peter Lanjouw (2002) 'Micro-level Estimation of Welfare' [Estimasi Tingkat Mikro terhadap Kesejahteraan]. Unpublished mimeo
- Sumarto, Sudarno, Asep Suryahadi, and Wenefrida Widyanti (2002) 'Designs and Implementation of the Indonesian Social Safety Net Programs' [Desain dan Implementasi Program Jaring Perlindungan Sosial di Indonesia] dalam *Developing Economics*, 40(1), hlm. 3-31
- Sumarto, Sudarno, Syaikhu Usman, and Sulton Mawardi (1997) 'Agriculture's Role in Poverty Reduction: Bringing Farmers to the Policy Formulation Process' [Peran Sektor Pertanian dalam Penanggulangan Kemiskinan: Mengikutsertakan Petani dalam Proses Penyusunan Kebijakan] dalam *Agriculture Sector Strategy Review*. Jakarta: Ministry of Agriculture Republic of Indonesia
- Suryahadi, Asep, Wenefrida Widyanti, Daniel Perwira, Sudarno Sumarto, Chris Elbers, dan Menno Pradhan (2003) 'Developing a Poverty Map for Indonesia: An Initiatory Work in Three Provinces, Part I: Technical Report' [Pengembangan Peta Kemiskinan untuk Indonesia: Studi Awal di Tiga Provinsi, Bagian I: Laporan Teknis]. SMERU Research Report. Jakarta: The SMERU Research Institute
- Suryahadi, Asep, Wenefrida Widyanti, Rima Prama Artha, Daniel Perwira, dan Sudarno Sumarto (2005) 'Developing a Poverty Poverty Map for Indonesia: A Tool for Better Targeting in Poverty Reduction and Social Protection Programs, Book 1: Technical Report' [Pengembangan Peta Kemiskinan untuk Indonesia: Instrumen untuk Penetapan Sasaran yang Lebih Baik bagi Program Penanggulangan Kemiskinan, Buku 1: Laporan Teknis]. SMERU Research Report. Jakarta: The SMERU Research Institute

List of References

- Bigman, David and Hippolyte, Fofack (2000) 'Geographical Targeting for Poverty Alleviation: An Introduction to the Special Issue' in *The World Bank Economic Review*, 14(1), pp. 129-145
- BKKBN (1994) *Pembangunan Keluarga Sejahtera di Indonesia Berdasarkan UU No. 10 Tahun 1992 dan GBHN 1993* [Family Welfare Development in Indonesia Based on Law No. 10/1992 and State Guidelines 1993]. Jakarta: Kantor Menteri Negara Kependudukan/Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
- Elbers, Chris, Jean O. Lanjouw, and Peter Lanjouw (2001) 'Welfare in Villages and Towns: Micro-Level Estimation of Poverty and Inequality.' Vrije Universiteit, Amsterdam, mimeo
- Elbers, Chris, Jean O. Lanjouw, and Peter Lanjouw (2002) 'Micro-level Estimation of Welfare.' Unpublished mimeo
- Sumarto, Sudarno, Asep Suryahadi, and Wenefrida Widyanti (2002) 'Designs and Implementation of the Indonesian Social Safety Net Programs' in *Developing Economics*, 40(1), pp. 3-31
- Sumarto, Sudarno, Syaikhu Usman, and Sulton Mawardi (1997) 'Agriculture's Role in Poverty Reduction: Bringing Farmers to the Policy Formulation Process' in *Agriculture Sector Strategy Review*. Jakarta: Ministry of Agriculture Republic of Indonesia
- Suryahadi, Asep, Wenefrida Widyanti, Daniel Perwira, Sudarno Sumarto, Chris Elbers, and Menno Pradhan (2003) 'Developing a Poverty Poverty Map for Indonesia: An Initiatory Work in Three Provinces, Part I: Technical Report'. SMERU Research Report. Jakarta: The SMERU Research Institute
- Suryahadi, Asep, Wenefrida Widyanti, Rima Prama Artha, Daniel Perwira, and Sudarno Sumarto (2005) 'Developing a Poverty Poverty Map for Indonesia: A Tool for Better Targeting in Poverty Reduction and Social Protection Programs, Book 1: Technical Report.' SMERU Research Report. Jakarta: The SMERU Research Institute

Pada 2005 SMERU melakukan lokakarya sosialisasi hasil pemetaan kemiskinan dan verifikasi di berbagai wilayah, termasuk Sulawesi Utara.

In 2005 SMERU conducted workshops to socialize the poverty mapping results in various regions, including North Sulawesi.





# PETA KEMISKINAN INDONESIA: METODE DAN IMPLEMENTASINYA

## A POVERTY MAP OF INDONESIA: METHOD AND IMPLEMENTATION

Chris Elbers\*



### Pengantar

Pada 2002 saya mengunjungi Lembaga Penelitian SMERU dalam rangka memprakarsai pembuatan peta kemiskinan untuk Indonesia dengan menggunakan metodologi yang pada waktu itu relatif baru yang dijelaskan dalam Elbers, Lanjouw, dan Lanjouw (2003). Pada bagian berikut, saya akan menguraikan metodologi tersebut secara terperinci. Kendati prinsip-prinsip di balik kegiatan pemetaan kemiskinan tidak terlalu sulit untuk dipahami, kesulitannya terletak pada detail pelaksanaannya, yakni: untuk menciptakan peta yang baik diperlukan keterampilan dalam pengelolaan data, pemrograman, ekonometrik, serta pemahaman mengenai datanya. Semua keahlian yang dibutuhkan ini dapat ditemui di SMERU. Wenefrida (Wina) Widyanti, khususnya telah terbukti sebagai empu dalam pengelolaan data dan pemrograman serta merupakan faktor utama yang menentukan kesuksesan pekerjaan tersebut. Sungguh merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk memiliki kesempatan bekerja sama dengan Wina.

\* Chris Elbers adalah profesor di Vrije (Free) University Amsterdam.

### Introduction

*In 2002 I visited The SMERU Research Institute to initiate the construction of a poverty map for Indonesia using a (then) relatively new methodology, formally described in Elbers, Lanjouw, and Lanjouw (2003). Below, I will describe this methodology in some detail. Although the principles behind poverty mapping are not very difficult, the devil is in the details: creating a successful map requires skills in data management, programming, econometrics, and on top of that an understanding of what the data is about. All these expertise could be found at SMERU. Wenefrida (Wina) Widyanti in particular proved to be a true master in data management and programming and was a major factor in the eventual success of the whole project. It is a privilege to have had the experience of collaborating with her.*

\* Chris Elbers is a professor at the Vrije (Free) University Amsterdam.

### Pemetaan Kemiskinan

Pengumpulan data statistik sosial dan ekonomi adalah kegiatan yang biasa dilakukan secara berkala dalam masyarakat modern seperti di Indonesia. Data dapat membantu pemerintah dan organisasi lainnya memantau kemajuan pembangunan dan menunjukkan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam kebijakan pembangunan. Peneliti juga memerlukan data sebagai dasar analisis. Variabel kunci untuk mengukur dan menganalisis kemiskinan adalah tingkat pengeluaran konsumsi rumah tangga. Salah satu definisi kemiskinan yang umum dipakai mengacu pada informasi tersebut. Seseorang dikategorikan miskin jika ia hidup di dalam rumah tangga yang pengeluaran konsumsi per kapitanya berada di bawah “garis kemiskinan” yang biasanya telah ditetapkan secara nasional.

Di Indonesia data mengenai pengeluaran konsumsi rumah tangga dihimpun setiap 3 tahun sebagai bagian dari Susenas (Survei Sosial-Ekonomi Nasional). Namun, pengumpulan data semacam ini sangat memakan waktu dan biaya yang besar, dan oleh sebab itu terbatas kepada sampel rumah tangga. Dengan menggunakan teknik statistik standar, sampel tersebut menghasilkan pengukuran kemiskinan yang cukup tepat pada tingkat provinsi, dengan membedakan antara penduduk perkotaan dan pedesaan. Hal ini memang bermanfaat untuk berbagai kepentingan, tetapi pembuat kebijakan sering tidak ingin berhenti sampai di tingkat provinsi saja agar, misalnya, dapat membuat kebijakan yang lebih tanggap terhadap kondisi kemiskinan di tingkat lokal. Pemetaan kemiskinan adalah teknik yang digunakan untuk menghitung kemiskinan dengan ketepatan yang cukup layak pada tingkat-tingkat agregasi yang lebih rendah, seperti kabupaten/kota, kecamatan, atau desa. Hasilnya dapat disajikan dalam bentuk peta geografis, maka muncullah istilah “pemetaan” kemiskinan.

Metode yang khusus digunakan untuk pemetaan kemiskinan di Indonesia didasarkan pada penggabungan data tingkat rumah tangga dari modul konsumsi Susenas dengan data tingkat rumah tangga dari Sensus Penduduk 2000 yang tentunya memerlukan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Peta kemiskinan yang pertama dirancang untuk daerah perkotaan Kalimantan Timur dengan menggunakan data Susenas 1999. Karena proyek uji coba ini dimaksudkan sebagai cara untuk mentransfer pengetahuan, studi ini memasukkan banyak sesi pelatihan yang dihadiri baik oleh staf SMERU maupun BPS.

Peta Kemiskinan Indonesia membantu pembuat kebijakan untuk menyusun kebijakan yang lebih tanggap terhadap kondisi kemiskinan di tingkat lokal.

*The Poverty Map of Indonesia helps policymakers formulate policies that are more responsive to local poverty conditions.*

### Poverty Mapping

*The collection of social and economic statistics is a routine activity in modern societies such as the Republic of Indonesia. Data can help the government and other organizations monitor development progress and can give focus to development policies. Researchers also need data as the basis for analysis. A key variable for measuring and analyzing poverty is the level of consumption expenditures in households. One widely used definition of poverty is based on this information: a person is classified as poor if he or she is living in a household where consumption expenditure per capita is below the “poverty line”, usually a national standard.*

*In Indonesia data on households’ consumption expenditure is collected every 3 years as part of the Susenas (National Socioeconomic Survey). However, such data collection is costly in terms of time and money and is therefore restricted to a sample of all households. Using standard statistical techniques the sample leads to reasonably precise measurements of poverty at the provincial level, distinguishing between the urban and rural populations. This is useful for many purposes but policy makers often want to go beyond the provincial level, for instance to make policy more responsive to local poverty conditions. Poverty mapping is a technique used to estimate poverty with reasonable precision at these lower levels of aggregation: district level (kabupaten/kota), subdistrict level (kecamatan), or village level. Results can be presented in the form of geographical maps, hence the name poverty “mapping”.*

*The particular method of poverty mapping used in Indonesia is based on combining household-level data from the Susenas consumption module with household-level data from the 2000 Population Census which required the cooperation of Statistics Indonesia (BPS). The first poverty map was for urban East Kalimantan using Susenas data for 1999. Since this pilot project was also meant as a way to transfer knowledge, it included numerous instruction sessions attended by both SMERU and BPS staff.*



Sri Budiayati/SMERU



Sri Budiarti/SMERU

Pemetaan kemiskinan adalah teknik yang digunakan untuk menghitung kemiskinan dengan ketepatan yang cukup layak pada tingkat-tingkat agregasi yang lebih rendah, seperti kabupaten/kota, kecamatan, atau desa.

*Poverty mapping is a technique used to estimate poverty with reasonable precision at lower levels of aggregation, such as the district level (kabupaten/kota), subdistrict level (kecamatan), or village level.*

Langkah pertama dalam pembuatan peta kemiskinan adalah merancang sebuah model prediksi (atau estimasi) pengeluaran rumah tangga. Model ini didasarkan pada data Susenas. Data ini bermanfaat karena survey rumah tangga Susenas tidak hanya berisi data mengenai pengeluaran rumah tangga tetapi juga mencakup data karakteristik rumah tangga lainnya yang relevan (termasuk jumlah anggota rumah tangga, pendidikan anggota rumah tangga, kualitas kondisi rumah, akses kepada infrastruktur, dan jumlah anak yang bersekolah). Dengan menggunakan teknik regresi, sebuah model dihasilkan dari data Susenas yang dapat memprediksi konsumsi pengeluaran per kapita sebuah rumah tangga dari serangkaian karakteristik rumah tangga yang telah ditentukan, beserta perkiraan terhadap galat margin prediksi tersebut. Dengan kata lain, jika seorang mengajukan sederet karakteristik sebuah rumah tangga, model ini dapat memprediksi tingkat pengeluaran konsumsi per kapita rumah tangga tersebut. Jika karakteristiknya merupakan karakteristik rumah tangga sampel Susenas, maka hal ini tidak akan bermanfaat karena pengeluaran konsumsi sudah diketahui untuk rumah tangga dalam sampel Susenas. Namun, jika karakteristiknya dari rumah tangga yang belum diketahui pengeluarannya, maka prediksi ini akan menyediakan informasi baru. Oleh karena itu, korelasi antara pengeluaran konsumsi dan karakteristik rumah tangga yang ditemukan dalam Susenas digunakan untuk menyimpulkan angka pengeluaran konsumsi bagi rumah tangga lainnya. Bahkan, dengan menggunakan perkiraan galat prediksi, dapat diketahui probabilitas sebuah rumah tangga dengan serangkaian karakteristik tertentu adalah rumah tangga miskin.

Pada tingkat ini data sensus penduduk mulai memainkan peran. Sensus Penduduk Indonesia 2000 mencakup data mengenai sejumlah karakteristik rumah tangga yang juga dihimpun dalam Susenas (jumlah anggota rumah tangga, kepemilikan rumah, fasilitas, umur dan pendidikan anggota rumah tangga, jumlah anak, dll.). Tetapi perlu diingat bahwa sensus penduduk (secara prinsip) mencakup semua rumah tangga dalam populasi. Oleh karena itu, model prediksi yang didasarkan pada Susenas sebagaimana dijelaskan

*The first step in the construction of the poverty map was to make a model “predicting” (or “estimating”) household expenditure. The model was based on Susenas data which was useful because the Susenas household survey not only contains data on household expenditure but also includes data on many other household characteristics of interest (including household size, education of household members, quality of housing, access to infrastructure, and number of children attending school). Using regression techniques, a model was derived from the Susenas data that could predict consumption expenditure per capita in a household from a given set of household characteristics, along with an assessment of the error margins of such a prediction. In other words, if someone came up with a set of household characteristics, the model could predict the likely level of per capita consumption expenditure for that household. If the characteristics were from a household sampled in the Susenas this would not be very useful, since consumption expenditure is already known for households in the Susenas sample. But if the characteristics were from households for which consumption expenditure is unknown the prediction would provide new information. Thus the correlations between consumption expenditure and household characteristics found in the Susenas were used to infer consumption expenditure for other households. In fact, if we also use the assessment of the prediction error, we can estimate the probability that a household with a given set of characteristics is poor.*

*At this point the population census enters into the story. Indonesia’s 2000 Population Census includes data on a fairly extensive list of household characteristics that are also collected in the Susenas (household size, house ownership, facilities, age and education of household members, occupation, number of children, etc.). But note that the population census (in principle) includes all households in the population. Hence the Susenas-based prediction model outlined above could be used to*

Data statistik sosial dan ekonomi membantu menunjukkan aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam kebijakan pembangunan.

*Social and economic statistics help give focus to development policies.*



di atas dapat digunakan untuk memprediksi tingkat pengeluaran (status kemiskinan) untuk setiap rumah tangga dalam populasi, dengan syarat model prediksi ini hanya menggunakan karakteristik yang juga terdapat dalam data sensus penduduk. Memprediksi tingkat konsumsi dan status kemiskinan untuk suatu rumah tangga dengan cara ini tidak akan memberi informasi yang banyak; galat margin akan sangat besar sehingga prakiraannya menjadi sama sekali tidak berguna. Namun, dengan mengombinasikan rumah tangga dalam kelompok (desa, kecamatan, kabupaten, “penduduk sasaran”—menurut jargon pembuat peta kemiskinan), ternyata manfaat nyata yang diperoleh adalah bahwa sampel yang lebih besar cenderung mengurangi galat margin. Sebagai konsekuensi, pada tingkat kelompok, dapat diberikan perkiraan yang cukup tepat atas distribusi pengeluaran di dalam kelompok dan khususnya persentase masyarakat di bawah garis kemiskinan.

Ringkasan langkah-langkah pembuatan peta kemiskinan adalah sebagai berikut.

1. Menentukan karakteristik rumah tangga yang dapat ditemukan di dalam Susenas dan sensus penduduk.
2. Dengan menggunakan data dari Susenas, membuat model yang dapat memprediksi pengeluaran konsumsi per kapita dari karakteristik rumah tangga yang biasanya digunakan dalam Susenas dan sensus penduduk.
3. Dengan menggunakan data mengenai karakteristik rumah tangga dari sensus penduduk, dilakukan prediksi pengeluaran per kapita untuk semua rumah tangga di dalam populasi (disertai dengan perkiraan mengenai galat prediksi).
4. Menggabungkan tingkat pengeluaran rumah tangga yang telah diprediksi ke dalam kelompok agar galat prediksi dapat dikurangi hingga tingkat yang bisa diterima.

*predict expenditure levels (and poverty status) for each household in the population—provided that the prediction model only uses characteristics that are also registered in the population census. Predicting consumption levels and poverty status for individual households in this way would not be very informative; the margins of error would be so big as to render predictions totally useless. However, by combining households in groups (village, kecamatan, kabupaten; “target populations” in the jargon of poverty mappers) we benefit from the fact that larger samples tend to reduce the error margins. Consequently, at the group level fairly precise estimates can be given of the distribution of expenditure in the group and in particular of the percentage of people below the poverty line.*

*Summarizing, the steps in poverty mapping are:*

1. *Determine the set of household characteristics that can be found both in the Susenas and in the population census.*
2. *Using data from the Susenas, make a model that can predict consumption expenditure per capita from the household characteristics common to the Susenas and the census.*
3. *Using data on household characteristics from the census, predict expenditure per capita for all households in the population (with an assessment of prediction error).*
4. *Aggregate the predicted expenditure levels of households in groups so that prediction errors are reduced to acceptable levels.*

Perlu dicatat bahwa pada langkah keempat, jika galat prediksi hanya dapat diterima bila ukuran kelompok sebesar provinsi, maka pemetaan kemiskinan ini gagal karena Susenas sudah menyediakan informasi mengenai kemiskinan di tingkat provinsi. Namun, kami menemukan bahwa perkiraan yang cukup tepat biasanya dapat diperoleh untuk kelompok sekecil 10.000 rumah tangga atau bahkan kurang.

### Sumber Galat

Diatas telah disinggung mengenai ketepatan perkiraan kemiskinan beberapa kali. Meskipun menarik untuk melihat sebuah peta yang menghitung perbedaan dalam tingkat kemiskinan, namun muncul pertanyaan apakah perbedaan tersebut kemungkinan disebabkan oleh galat. Hal ini penting khususnya jika peta kemiskinan akan digunakan untuk mengalokasikan anggaran lokal. Banyak sumber potensial galat yang dapat melemahkan tingkat kepercayaan terhadap prediksi kemiskinan. Salah satu galat sistematis adalah persoalan apakah data yang diperoleh dari Susenas dan data yang diperoleh dari sensus penduduk dapat diperbandingkan. Meskipun keduanya memberi informasi, misalnya, mengenai pendidikan kepala rumah tangga, harus diverifikasi bahwa pendidikan diukur dengan cara sama dalam kedua kelompok data. Perbedaan yang tipis dalam definisi atau pelatihan enumerator antara Susenas dan sensus penduduk bisa menghasilkan dua variabel yang sama-sama mengukur pendidikan kepala rumah tangga, tetapi dengan cara yang berbeda. Sebagai contoh, satu kelompok data dapat memberi jumlah tahun bersekolah sementara kelompok lainnya dapat memberi informasi mengenai tingkat pendidikan tertinggi; atau dalam mengukur umur, ada yang menggunakan tahun dan ada yang mengklasifikasikannya ke dalam kelompok umur (0 sampai 5, 6 sampai 10, dsb.) Dalam kasus seperti ini, harus diupayakan dengan cermat agar kedua kelompok data lebih dapat diperbandingkan. Jika hal ini ternyata terlalu sulit untuk dilakukan bagi beberapa variabel, variabel tersebut tidak dapat digunakan untuk model prediksi.

Sebuah sumber utama galat (atau lebih tepatnya, sumber ketidaktepatan) adalah di dalam efek “lokasi” atau “kelompok”. Untuk mengurangi biaya pengumpulan data, survei seperti Susenas mengunjungi “sekelompok” 10 sampai 20 rumah tangga di dalam satu wilayah. Rumah tangga di dalam kelompok-kelompok tersebut bisa saja memiliki beberapa karakteristik tertentu yang sama yang tidak teramati (seperti tinggal di wilayah yang kondisi cuacanya cukup

*Note that with the fourth step, if prediction errors only become acceptable when the group is as big as a province, the poverty mapping exercise has failed since the Susenas alone already provides poverty information at provincial level. However, we typically found that fairly precise estimates can be obtained for groups as small as 10,000 households or even less.*

### Sources of Error

*Above I have mentioned the precision of poverty estimates several times. Although it is interesting to see a map of estimated differences in poverty, the question arises whether the perceived differences could be due to errors. This is especially important if one intends to use poverty maps to allocate local budgets. There are many potential sources of error that could undermine the reliability of poverty predictions. Among the systematic errors are problems of comparability of data obtained from Susenas and data obtained from the census. Even if both give information on, say, the education of the household head, it has to be verified that the way education is measured is the same in both data sets. Often, subtle differences in definition or training of enumerators between Susenas and census can result in two variables both measuring education of the household head, but differently. For instance, one data set could give the number of years of schooling and the other could give the most advanced exam passed. Or, in measuring age, one set could use years, and the other could classify in groups (0 to 5, 6 to 10, etc.). In such cases one must take care to make variables from the two data sets more comparable. If this turns out to be too difficult for some variables, these variables cannot be used for the prediction model.*

*A major source of error (or rather imprecision) is in “location” or “cluster” effects. To reduce the cost of data collection, surveys such as the Susenas visit “clusters” of 10 to 20 households within one area. Households in these clusters could well have certain (unobserved) characteristics in common (say, living in an area with favorable weather*

Wina, salah satu aktor kunci dalam keberhasilan pengembangan peta kemiskinan Indonesia.

*Wina, one of the key actors in the successful development of the poverty map of Indonesia.*



Sri Budiyanti/SMERU

baik) sehingga kebanyakan rumah tangga dari kelompok tersebut memiliki pendapatan yang lebih tinggi daripada diperkirakan dari karakteristik mereka. Efek kelompok ini sangat meningkatkan galat margin penghitungan kemiskinan. Untuk mengatasi galat ini, suatu teknik telah dikembangkan melalui pencocokkan kelompok dari Susenas yang berkarakteristik yang sama dengan kelompok dari wilayah enumerasi sensus penduduk. Upaya pencocokan ini ternyata adalah hal yang sangat menantang dalam pengembangan peta kemiskinan untuk Indonesia.

Sumber galat terakhir yang perlu disebutkan adalah “galat model”, model yang memberi batasan terhadap derajat ketepatan yang bisa dicapai. Meskipun ketepatan semakin meningkat dengan semakin besarnya ukuran kelompok (“penduduk sasaran”) yang akan diperkirakan status kemiskinannya, tetapi ketepatan sangat ditentukan oleh validitas model ekonometrik pengeluaran konsumsi rumah tangga sebagaimana telah diuraikan di atas. Model ini didasarkan pada sampel rumah tangga dan oleh karena itu parameter model yang diestimasi memiliki galat pengambilan sampel yang memengaruhi semua perkiraan kemiskinan selanjutnya. Spesifikasi model dan seleksi variabel yang akan digunakan dapat sedikit mengurangi “galat model” dan bersama-sama dengan perbandingan kelompok data dan upaya pencocokan lokasi merupakan langkah yang paling penting dalam mengembangkan model konsumsi.

Ketika model berhasil dirancang, langkah selanjutnya dalam menghitung kemiskinan (langkah 3 dan 4) cukup sederhana dan jelas. Namun, diperlukan adanya keterampilan pengelolaan data untuk menangani data yang sangat besar seperti sensus penduduk dan untuk mengoperasikan perangkat lunak peta kemiskinan. Untuk semua aspek terkait ini, yakni pengelolaan data, penguasaan pengoperasian komputer, dan pengetahuan mengenai data serta sumber data, almarhumah Wina adalah orang yang paling bisa diandalkan. Perannya akan sangat sulit untuk digantikan. ■

*conditions) so that most households from the cluster have higher incomes than expected, given their observed characteristics. Such cluster effects greatly increase the error margins of poverty estimates. To overcome this error a technique has been developed which requires matching clusters from the Susenas to so-called enumeration areas from the census. This matching proved particularly challenging in the construction of the poverty map for Indonesia.*

*One final source of error worth mentioning is “model error”, which effectively puts a limit on the degree of precision that can be achieved. Although precision increases with the size of the groups (“target populations”) for which poverty estimates are being prepared, precision is ultimately bound by the validity of the econometric model of household consumption expenditure mentioned above. That model is based on a sample of households and so the estimated model parameters are subject to sampling errors that affect all subsequent poverty estimates. Specification of the model and selection of the variables to use can reduce the “model error” somewhat and together with comparison of the data sets and matching locations these are the most important steps in creating the consumption model.*

*Once the model is constructed the subsequent steps in estimating poverty (steps 3 and 4 above) are comparatively simple and straightforward. Still it requires data management skills to manipulate huge data sets such as census information and run the available poverty mapping software. For all these aspects: data management, computer skills, and knowledge about data and data sources, the late Wina was an indispensable source. She will be very difficult to replace. ■*



### Publikasi yang Akan Datang/*Forthcoming Publications*

#### ○ Laporan Penelitian/*Research Reports*

Keluar dari Kemiskinan di Timor Barat: Memahami Mobilitas Sosial dan Dinamika Kemiskinan di Wilayah yang Terkena Konflik (Ruly Marianti dan Rizki Fillaili. Editor: Justin Sodo)

Juga tersedia dalam bahasa Inggris/*Also available in English:*

*Moving Out of Poverty in West Timor: Understanding Social Mobility and Poverty Dynamics in a Conflict-Affected Area (Ruly Marianti and Rizki Fillaili. Translators: Joan Haradjono and Chris Stewart. Editor: Chris Stewart)*

#### ○ Buku/*Book*

Dampak Supermarket terhadap Pasar dan Pedagang Ritel Tradisional di Daerah Perkotaan di Indonesia [*Impact of Supermarkets on Traditional Markets and Retailers in Indonesia's Urban Centers*]

Tersedia dalam bahasa Indonesia/*Available in Indonesian.*

# VERIFIKASI PETA KEMISKINAN MELALUI METODE KUANTITATIF DAN METODE PARTISIPATORIS

## VERIFICATION OF THE POVERTY MAP USING QUANTITATIVE AND PARTICIPATORY METHODS

Widjajanti I. Suharyo\*



Justin Sodo/SMERU

Bagi banyak program penanggulangan kemiskinan, penentuan penerima program seringkali menjadi tantangan terberat. Dalam upaya mempermudah dan meningkatkan ketepatan penentuan sasaran tersebut, melalui pendekatan kuantitatif telah dikembangkan metode estimasi angka kemiskinan wilayah kecil—yang selanjutnya disebut dengan istilah “pemetaan kemiskinan”. Melalui metode ini dapat dihitung perkiraan angka kemiskinan sampai di tingkat desa dengan menggabungkan data sensus penduduk dengan data survei sosial-ekonomi. Selain itu, metode partisipatoris yang semakin populer dalam dekade terakhir ini juga mengembangkan sistem penskoran dan pemeringkatan melalui diskusi kelompok terfokus (FGD) yang secara sederhana dapat diarahkan untuk melakukan analisis kondisi kemiskinan, termasuk penentuan daerah yang dianggap miskin dan memperkirakan proporsi penduduk miskin di tingkat dusun atau desa.

For many poverty alleviation programs, the biggest challenge is mostly in determining their beneficiaries. In order to make it easier to do this and increase the accuracy of targeting, a method of estimating the poverty rate in small areas has been developed using a quantitative approach—henceforth referred to as “poverty mapping”. Using this method, the poverty rate can be estimated down to village level by combining population census data and socioeconomic survey data. In addition, the participatory method, which has become increasingly popular over the last decade, has developed a scoring and ranking system through focus group discussions (FGDs) which were directed to analyze the condition of poverty, including determining regions which are considered poor, and estimate the proportion of poor residents at the hamlet (dusun) or village level.

\* Widjajanti I. Suharyo adalah peneliti senior Lembaga Penelitian SMERU.

\* Widjajanti I. Suharyo is a senior researcher at The SMERU Research Institute.

Sebagai bagian dari studi pemetaan kemiskinan, pada Agustus–November 2004, Lembaga Penelitian SMERU melakukan serangkaian FGD di 3 provinsi, 3 kabupaten, 6 kecamatan, dan 18 desa dengan tujuan untuk membandingkan hasil pemetaan kemiskinan dengan kondisi nyata di lapangan berdasarkan persepsi masyarakat lokal. Karena data dasar yang digunakan dalam pemetaan kemiskinan adalah data Sensus Penduduk Tahun 2000, sedangkan FGD dilakukan pada 2004, maka peserta FGD diarahkan untuk mendiskusikan kondisi pada 2004 dan 2000. Dalam diskusi tersebut peneliti hanya bertindak sebagai fasilitator dan baik fasilitator maupun peserta diskusi tidak mengetahui terlebih dahulu hasil pemetaan kemiskinan yang telah dilakukan SMERU.

### Pemetaan Kemiskinan Wilayah Kecil di Indonesia

Pemetaan kemiskinan wilayah kecil memuat estimasi angka kemiskinan (proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan) di tingkat propinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan. Peta ini disusun berdasarkan pengolahan data kor dan modul konsumsi Susenas (Survei Sosial-Ekonomi Nasional) 1999, data Podes (Potensi Desa) 2000, dan data Sensus Penduduk 2000 (lihat artikel Chris Elbers dalam edisi ini).

### Metode Partisipatoris

Pendekatan partisipatoris dilakukan melalui FGD di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa dengan mengundang berbagai pemangku kepentingan dari lingkungan pemerintah daerah (pemda) dan nonpemerintah yang telah tinggal setidaknya 5 tahun di daerah yang bersangkutan dan cukup memahami kondisi kehidupan masyarakat di daerahnya. Peserta FGD di tingkat propinsi, kabupaten, dan kecamatan terdiri dari staf teknis pemda dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dinas-dinas teknis (pendidikan, kesehatan, pertanian, pekerjaan umum, pemberdayaan masyarakat, keluarga berencana), dan kantor statistik, serta aktivis lembaga-lembaga nonpemerintah dan akademisi dari perguruan tinggi setempat. Jumlah peserta di setiap FGD berkisar antara 8 sampai 23 orang.

Peserta FGD di tingkat propinsi, kabupaten, dan kecamatan tersebut diminta untuk menyusun peringkat daerah di bawahnya (kabupaten, kecamatan, dan desa) berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Untuk penyusunan peringkat tersebut, terlebih dahulu peserta diarahkan untuk menyepakati kriteria-kriteria yang akan digunakan sebagai ukuran kesejahteraan. Selanjutnya peserta diminta untuk memberikan skor untuk tiap-tiap kriteria yang kemudian dijumlahkan dan dijadikan landasan pemeringkatan daerah untuk kondisi 2004. Untuk pemeringkatan daerah pada 2000, didiskusikan faktor-faktor yang memengaruhi perubahan kesejahteraan untuk membantu peserta mengingat kembali kondisi 4 tahun sebelumnya. Beberapa daerah telah mengalami perubahan administrasi karena pemekaran daerah. Dalam kasus seperti ini pembagian administrasi diberlakukan sesuai dengan data 2000 sehingga hasilnya dapat diperbandingkan dengan hasil pemetaan kemiskinan.

*As part of the poverty mapping study, during August–November 2004, The SMERU Research Institute carried out a series of FGDs in 3 provinces, 3 districts (kabupaten), 6 subdistricts (kecamatan), and 18 villages with the aim of comparing the results of poverty mapping with the real condition in the field based on perceptions of the local community. Since the basic data used for poverty mapping was the 2000 Population Census, whereas the FGDs took place in 2004, the FGD participants were encouraged to discuss the condition of poverty in both 2004 and 2000. During these discussions researchers acted only as facilitators and both facilitators and participants did not know the results of poverty mapping conducted by SMERU in advance.*

### Small Area Poverty Mapping of Indonesia

*Small area poverty mapping included estimating the poverty rate (the proportion of the population below the poverty line) at the provincial, kabupaten/kota (district/city), kecamatan, and village/kelurahan<sup>1</sup> levels. This map was constructed based on the analysis of the 1999 Susenas (National Socioeconomic Survey) core data and consumption module, 2000 Podes (Village Potential) data, and data from the 2000 Population Census (see Chris Elber's article in this edition).*

### Participatory Method

*The participatory approach was used in FGDs at the provincial, kabupaten, kecamatan, and village levels by inviting various stakeholders from local government and nongovernment circles who have lived in the relevant region for at least 5 years and understood the condition of the community's livelihoods in the region. FGD participants at the provincial, kabupaten, and kecamatan levels included local government technical staff from the Regional Development Planning Board (Bappeda), technical offices (education, health, agriculture, public works, community empowerment, family planning), and the statistics office, as well as nongovernment organization activists and academics from local tertiary education institutions. The number of participants in each FGD ranged from 8 to 23 people.*

*FGD participants at the provincial, kabupaten, and kecamatan levels were asked to rank the area below their own (kabupaten, kecamatan, and village) based on welfare levels. To arrange these ranks, first the participants were asked to agree to what criteria would be used to measure welfare. Then participants were asked to give their score for each criteria, these scores were totaled and became the basis for regional ranking for the 2004 condition. To rank the regions in 2000, factors which influence changes in welfare were discussed to help participants recall the condition 4 years earlier. Some regions had already had a change in administration because of regional subdivision. In such cases the administration divisions considered were those that existed at the time of the 2000 data so the results could be compared with the poverty mapping results.*

<sup>1</sup> A kelurahan is a village level administrative area located in an urban center.



Di tingkat desa, peserta FGD terdiri dari perempuan dan laki-laki yang memahami kondisi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat di setiap desa. Kebanyakan dari mereka adalah kepala dusun, tokoh/pemuka desa, kader, guru, dan perempuan yang aktif dalam kegiatan masyarakat seperti PKK (Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga) dan posyandu. Peserta FGD tersebut mendiskusikan klasifikasi kesejahteraan masyarakat desa, ciri-ciri kesejahteraan, dan proporsi rumah tangga dalam setiap kelompok kesejahteraan pada 2004. Selanjutnya didiskusikan perubahan tingkat kesejahteraan pada 4 tahun terakhir dan dibuat perkiraan proporsi rumah tangga untuk setiap kelompok kesejahteraan pada 2000. Untuk desa-desa yang mengalami pemekaran, diskusi dilakukan di desa induk dan cakupan diskusi meliputi wilayah desa lama.

### Perbandingan Peringkat Kesejahteraan

Cara paling mudah untuk membandingkan hasil pemeringkatan daerah adalah dengan menghitung korelasi (*rank correlation*) antara hasil pemetaan kemiskinan dan hasil FGD. Namun, dengan cara ini galat standar yang dihasilkan oleh pemetaan wilayah kecil tidak akan diperhitungkan sehingga tingkat konsistensi antara kedua pemeringkatan tersebut akan cenderung lebih kecil. Sebagaimana dikemukakan dalam laporan teknis studi pemetaan kemiskinan (Suryahadi *et al.* 2005), interpretasi hasil pemetaan wilayah kecil sebaiknya tidak hanya mengacu pada titik estimasi, tetapi juga galat standarnya. Oleh karena itu, perbandingan antara hasil pemetaan kemiskinan wilayah kecil dan hasil FGD juga dilakukan dengan membandingkan antara sepasang daerah (*pair wise comparison*), yang hasilnya dapat dibedakan menjadi tiga golongan sebagai berikut (Gambar 1).

1. **“Cocok” (Match)** bila hasil pemeringkatan dari FGD sama dengan peringkat berdasarkan titik estimasi (*point estimate*) pemetaan kemiskinan dan tidak ada tumpang-tindih antara estimasi tingkat kemiskinan terendah salah satu daerah dengan estimasi tingkat kemiskinan tertinggi daerah lainnya setelah memperhitungkan galat standar estimasi tingkat kemiskinan.

2. **“Tidak Dapat Disimpulkan” (Inconclusive)** jika hasil pemeringkatan dari FGD sesuai atau bertentangan dengan peringkat berdasarkan titik estimasi pemetaan kemiskinan, namun ada tumpang-tindih (*overlap*) antara estimasi tingkat kemiskinan terendah salah satu daerah dengan estimasi tingkat kemiskinan tertinggi daerah lainnya setelah memperhitungkan galat standar estimasi tingkat kemiskinan.

3. **“Tidak Cocok” (No Match)** bila pemeringkatan yang dihasilkan FGD bertentangan dengan peringkat berdasarkan titik estimasi pemetaan kemiskinan dan tidak ada tumpang-tindih setelah memperhitungkan galat standar.

At the village level, FGD participants consisted of women and men who understood the living conditions and welfare of the community in each village. Most of those involved were hamlet heads, prominent village figures/leaders, cadres, teachers, and women active in community activities such as PKK (Family Welfare and Empowerment) and posyandu (integrated health service post). These FGD participants discussed the classification of community welfare in the village, welfare characteristics, and the proportion of households in each welfare group in 2004. Following this was a discussion about the changes to the welfare level over the past 4 years and an estimation was made about the proportion of households in each welfare group in 2000. For villages which had been subdivided, discussions were conducted in the main village but the discussion covered the whole area of the old village.

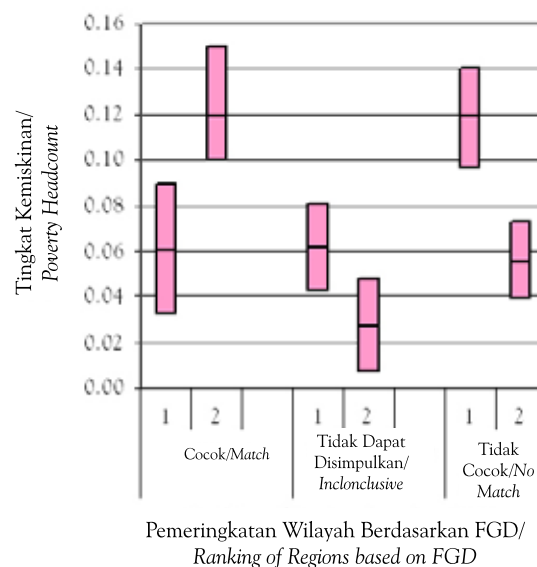
### Comparison of Welfare Ranks

The easiest way to compare the results of regional rankings is using rank correlation between poverty mapping results and FGD results. However, with this method the standard errors produced by the poverty mapping of small areas is not taken into account, thus the consistency level between the two rankings will tend to be smaller. As found in the report of the technical study for poverty mapping (Suryahadi *et al.* 2005), interpretation of the mapping results for small regions should not only refer to the estimation point, but also to the standard errors. Thus, comparisons between the results of poverty mapping in small areas and FGD results need to take place along with a pair wise comparison, the results of which can be differentiated into the following three groups (Figure 1).

1. **“Match”**: if the results of the rankings from the FGD are the same as those based on the poverty mapping point estimate and there is no overlap between the estimation of the lowest poverty level in one area and the highest poverty level in another area after the standard error of the poverty estimate has been taken into account.

2. **“Inconclusive”**: if the results of the rankings from the FGD match or contradict the rankings based on the poverty mapping point estimate, but there is overlap between the estimation of the lowest poverty level in one area and the estimation of the highest poverty level in another area after the standard errors have been taken into account.

3. **“No Match”**: if the rankings from the FGD contradict with the rankings based on the poverty mapping point estimate and there is no overlap after taking into account the standard errors..



**Gambar 1. Contoh 3 Kategori Hasil Perbandingan/Figure 1. Examples of the Three Categories of Comparison Results**

Tabel 1. Ringkasan Perbandingan Pemeringkatan Wilayah Berdasarkan FGD dan Pemetaan Kemiskinan di Riau, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat/

Table 1. Summary of Regional Ranking Comparisons Based on FGD and Poverty Mapping in Riau, North Sulawesi, and West Nusa Tenggara

Daerah/Region	Jumlah Wilayah/ Number of Regions	N	Korelasi Peringkat/ Rank Correlation		Perbandingan antarpasangan Daerah antara Hasil Pemetaan Kemiskinan dan FGD/ <i>Pair Wise Correlation between Poverty Mapping and FGD</i>					
					Hasil FGD untuk 2000/ 2000 FGD results			Hasil FGD untuk 2004/ 2004 FGD results		
			2000	2004	Cocok/ Match	Tidak Dapat Disimpulkan/ Inconclusive	Tidak Cocok/ No Match	Cocok/ Match	Tidak Dapat Disimpulkan/ Inconclusive	Tidak Cocok/ No Match
<b>Kabupaten di Propinsi/Kabupaten in Province</b>										
Riau	15/16	105/120	0.69	0.7	75%	24%	1%	76%	22%	2%
Sulawesi Utara/ North Sulawesi	5	10	0.8	1	80%	10%	10%	100%	0%	0%
Nusa Tenggara Barat/ West Nusa Tenggara	7	21	0.54	0.54	71%	29%	0%	71%	29%	0%
<b>Total Kabupaten</b>	<b>27/28</b>	<b>136/141</b>			<b>75%</b>	<b>21%</b>	<b>4%</b>	<b>82%</b>	<b>17%</b>	<b>1%</b>
<b>Kecamatan di Kabupaten/Kecamatan in Kabupaten</b>										
Indragiri Hulu	6	15	0.94	0.94	93%	7%	0%	93%	7%	0%
Bolaang Mongondow	15	105	0.6	0.57	73%	17%	10%	70%	20%	10%
Sumbawa Barat	5	10	0.69	0.69	70%	30%	0%	90%	10%	0%
<b>Total Kecamatan</b>	<b>20</b>	<b>115</b>			<b>75%</b>	<b>17%</b>	<b>8%</b>	<b>74%</b>	<b>18%</b>	<b>8%</b>
<b>Desa di Kecamatan/Villages in Kecamatan</b>										
Pasir Penyu	28	378	-0.15	-0.15	46%	54%	0%	46%	54%	0%
Seberida	10	45	0.39	0.39	64%	36%	0%	64%	36%	0%
Dumoga Timur	15	105	-0.11	-0.06	47%	45%	9%	49%	41%	10%
Bolaang Uki	12	66	0.89	0.74	85%	15%	0%	83%	17%	0%
Seteluk	7	21	0.89	0.93	86%	14%	0%	90%	10%	0%
Taliwang	8	28	0.19	0.21	57%	32%	11%	57%	32%	11%
<b>Total Desa/Total Villages</b>	<b>15</b>	<b>49</b>			<b>53%</b>	<b>45%</b>	<b>2%</b>	<b>53%</b>	<b>44%</b>	<b>2%</b>

Sumber/Source: Suharyo et al. (Februari 2005)/Suharyo et al. (February 2005).

Hasil perbandingan pemeringkatan kabupaten, kecamatan, dan desa yang diperoleh dari FGD dengan yang dihasilkan pemetaan kemiskinan (Tabel 1) secara umum memperlihatkan bahwa pemeringkatan kabupaten cenderung lebih konsisten dibandingkan hasil pemeringkatan kecamatan. Sama halnya, hasil pemeringkatan kecamatan relatif lebih konsisten dibandingkan pemeringkatan desa.

Dari perbandingan peringkat kabupaten terlihat bahwa meskipun korelasi di Propinsi Riau dan Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) relatif rendah, hasil perbandingan antarpasangan kabupaten memperlihatkan bahwa 75% perbandingan ternyata "cocok". Perbandingan pemeringkatan dari pemetaan kemiskinan ternyata juga relatif lebih konsisten dengan pemeringkatan FGD

The results of the rankings comparisons in kabupaten, kecamatan, and villages obtained from the FGDs and poverty mapping (Table 1) generally show that kabupaten rankings tend to be more consistent than the ranking results for kecamatan. Similarly, the kecamatan ranking results are relatively more consistent than village rankings.

From the kabupaten ranking comparison it can be seen that although the correlations in Riau and West Nusa Tenggara (NTB) provinces are relatively low, the kabupaten pair wise comparison shows that 75% of the comparisons "match". Ranking comparisons from the poverty mapping are also relatively more consistent with the FGD rankings for

untuk 2004 dibandingkan dengan untuk 2000. Hal ini menegaskan bahwa secara umum tingkat kesejahteraan relatif masyarakat di tingkat kabupaten cenderung tidak banyak berubah dan hasil pemetaan kemiskinan masih cukup valid sampai 4 tahun.

Perbandingan peringkat kecamatan juga memperlihatkan bahwa hasil pemetaan kemiskinan relatif lebih konsisten dengan hasil FGD untuk 2004 dibandingkan untuk 2000. Hal menarik yang perlu dicatat dari perbandingan pemeringkatan kecamatan ini adalah rendahnya konsistensi pemeringkatan kecamatan di Kabupaten Bolaang Mongondow. Kabupaten Bolaang Mongondow adalah kabupaten yang sangat besar dan daerahnya meliputi kecamatan-kecamatan dengan kehidupan pedesaan dan semiperkotaan yang sangat bervariasi. Karena model yang digunakan untuk mengestimasi tingkat kemiskinan hanya membedakan antara pedesaan dan perkotaan di tingkat propinsi, ada kemungkinan model estimasi yang digunakan kurang sesuai untuk beberapa daerah di Bolaang Mongondow yang sudah berkembang menjadi daerah semiperkotaan. Kemungkinan lainnya adalah rendahnya kualitas data Potensi Desa (Podes) yang digunakan karena hasil wawancara memperlihatkan kurangnya tenaga mitra statistik yang bertugas mengumpulkan data di beberapa kecamatan di kabupaten ini.

Hasil perbandingan peringkat desa memperlihatkan hasil yang sangat bervariasi antarkecamatan. Di dua kecamatan yang relatif belum terlalu berkembang dan memiliki karakteristik pedesaan yang sangat kuat (Kecamatan Seteluk dan Bolaang Uki), tingkat konsistensinya sangat tinggi. Namun, tingkat konsistensi peringkat desa cenderung lebih kecil di kecamatan-kecamatan yang sudah lebih berkembang menjadi daerah semiperkotaan. Tingkat konsistensi terendah terjadi di dua kecamatan yang sebagian desa-desa sudah berkembang menjadi daerah semiperkotaan, seperti Kecamatan Taliwang dan Dumoga Timur. Ada beberapa hal yang diduga menyebabkan hal ini terjadi. Pertama, kurang sesuai model estimasi tingkat kemiskinan untuk memperkirakan tingkat kemiskinan di desa-desa semiperkotaan dan desa perkotaan. Kedua, permasalahan juga bisa timbul dari ketepatan kategorisasi desa perkotaan yang secara administratif disebut “kelurahan” dengan pola kehidupan masyarakatnya yang mungkin masih bersifat semiperkotaan atau bahkan masih didominasi kehidupan pedesaan. Ketiga, ada juga kemungkinan bahwa pemeringkatan desa yang dilakukan peserta FGD lebih cenderung mengacu pada tingkat kemajuan desa dan bukan kondisi kesejahteraan penduduknya, misalnya, adanya kecenderungan peserta FGD untuk menganggap bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di desa yang paling terpencil adalah yang paling rendah.

Hasil verifikasi pemetaan kemiskinan untuk daerah-daerah dengan karakteristik pedesaan lebih mendekati hasil perkiraan masyarakat setempat.

*The poverty mapping results for rural areas tend to be closer to the community's estimated result.*

2004 compared with those for 2000. This indicates that generally relative community welfare at the kabupaten level tends to be quite stable and also that the results of poverty mapping are still valid after 4 years.

The kecamatan ranking comparison also shows that the results of poverty mapping are relatively more consistent with FGD results for 2004 compared to those for 2000. An interesting issue which must be noted from the kecamatan ranking comparisons is the low consistency for rankings of the kecamatan in Kabupaten Bolaang Mongondow. This kabupaten is a very large kabupaten covering kecamatan with greatly varying village and semi-urban livelihoods. Because the model used to estimate the poverty levels only differentiates between rural and urban areas at the provincial level, there is a possibility that the estimation model used is not appropriate for a number of regions in Bolaang Mongondow which have developed into semi-urban areas. Another possible explanation for the low consistency is the poor quality of the Village Potential data because interview results show there was a lack of statistical staff available to collect data in a number of kecamatan in this kabupaten.

The village ranking comparisons show greatly varied results between kecamatan. In two relatively undeveloped kecamatan which have strong village characteristics (Kecamatan Seteluk and Bolaang Uki) the consistency level is very high. However, the consistency level of village rankings tends to be lower in kecamatan which have developed into semi-urban areas. The lowest consistency level occurred in two kecamatan where some villages have developed into semi-urban areas, such as Kecamatan Taliwang and Dumoga Timur. There are a number of possible causes of this phenomenon. Firstly, the inappropriateness of the poverty level estimation model to estimate the poverty levels in semi-urban and urban villages. Secondly, problems can emerge with the accuracy of categorizing urban villages, administratively called “kelurahan”, with community livelihood patterns possibly still being semi-urban or even still being dominated by village livelihoods. Thirdly, there is also the possibility that village rankings from FGD participants tend to refer to the progress level of the village and not the welfare condition of the inhabitants; for example, there is a tendency for FGD participants to consider that the inhabitant's welfare level in the most isolated villages is the lowest.



Riski Fillaifi/SMERU

## Perbandingan Kemiskinan di Tingkat Desa

Di tingkat desa, perbandingan hasil pemetaan kemiskinan dan hasil FGD dilakukan dengan membandingkan titik dan kisaran estimasi angka kemiskinan yang dihasilkan pemetaan kemiskinan, dengan hasil klasifikasi kesejahteraan yang dihasilkan peserta FGD. Dalam FGD desa, peserta menggolongkan penduduk desa dalam beberapa kelompok kesejahteraan berdasarkan kriteria lokal yang telah disepakati. Dari 18 desa sampel, di 7 desa masyarakat digolongkan dalam 4 kelompok (kaya, sedang, miskin, dan sangat miskin), di 8 desa ditetapkan adanya 3 kelompok kesejahteraan, dan hanya di 3 desa masyarakat dikelompokkan menjadi 2 kelompok (sedang dan miskin).

Perbandingan antara hasil pemetaan kemiskinan dengan hasil FGD memperlihatkan bahwa hasil FGD untuk 2004 cenderung lebih mendekati hasil pemetaan kemiskinan dibandingkan dengan hasil FGD yang memperkirakan kondisi 2000. Juga ditemukan bahwa proporsi rumah tangga miskin hasil FGD lebih tinggi daripada nilai maksimum hasil pemetaan kemiskinan di semua desa yang diklasifikasikan sebagai daerah urban, yang angka kemiskinannya diestimasi dengan menggunakan model untuk rumah tangga perkotaan. Gejala semacam ini juga terlihat pada studi yang mengompilasi berbagai hasil analisis kemiskinan partisipatoris (Suharyo *et al.* 2003). Sebaliknya, hasil FGD relatif lebih sesuai dengan hasil pemetaan kemiskinan di desa-desa yang berada di Kecamatan Bolaang Uki dan Kecamatan Seteluk, yang hasil perbandingan pemerinkatan desa-desanya juga lebih konsisten dengan hasil pemetaan kemiskinan. Hal ini dapat menandakan bahwa hasil estimasi angka kemiskinan melalui pemetaan kemiskinan untuk daerah-daerah dengan karakteristik pedesaan lebih mendekati hasil perkiraan masyarakat, sedangkan hasil estimasi untuk daerah perkotaan cenderung kurang sesuai.

## Catatan Penutup

Penggunaan pendekatan kuantitatif dan partisipatoris (atau kualitatif secara umum) secara bersama dalam analisis kemiskinan makin populer akhir-akhir ini, sejalan dengan meningkatnya pemahaman bahwa kemiskinan bersifat multidimensional. Meskipun keduanya masih sering dipertentangkan karena adanya

Sebagai bagian dari studi pemetaan kemiskinan, pada 2004 SMERU melakukan serangkaian FGD di berbagai wilayah untuk membandingkan hasil pemetaan kemiskinan dengan kondisi nyata di lapangan berdasarkan persepsi masyarakat lokal.

*As part of the poverty mapping study, in 2004 SMERU carried out a series of FGDs in various regions to compare the results of poverty mapping with the real condition in the field based on perceptions of the local community.*

## Comparing Poverty at the Village Level

*At the village level, the comparison of poverty mapping and FGD results was carried out by comparing the poverty rate estimation point and range produced by the poverty mapping with the welfare classification results from the FGD participants. In the village FGD, participants grouped village inhabitants into a number of welfare groups based on local criteria which had been agreed on. From 18 sample villages, in 7 villages the community was grouped into 4 groups (rich, average, poor, very poor), in 8 villages there were 3 welfare groups, and in only 3 villages the community was classified into 2 groups (average and poor).*

*The comparison between poverty mapping and FGD results shows that the FGD results for 2004 tended to be closer to the poverty mapping results than FGD results estimating the condition in 2000. It was also found that the proportion of poor households in the FGD results was higher than the maximum value from poverty mapping results in all villages which were classified as urban areas, where the poverty rate was estimated using the urban household model. These tendencies were also observed in a study which compiled various participatory poverty analysis results (Suharyo *et al.* 2003). On the other hand, the FGD results tended to match more closely with poverty mapping results in villages in Kecamatan Bolaang Uki and Kecamatan Seteluk, where the village comparison rankings were also more consistent with the poverty mapping results. This indicates that the poverty rate estimation results using poverty mapping for rural areas tend to be closer to the community's estimated result, while estimation results for urban areas tend to be less accurate.*

## Closing Remarks

*The combined use of quantitative and participatory (or qualitative in general) approaches in poverty analysis has become increasingly popular in recent years, in line with the increasing understanding that poverty is multidimensional. Although both approaches are still often contrasted because there are differences in the way data is compiled*



perbedaan dalam cara pengambilan data dan variabel-variabel yang diukur, belakangan ini makin banyak upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan kekuatan yang dimiliki masing-masing pendekatan untuk mendapat hasil analisis yang lebih baik (Kanbur 2003). Perbandingan antara hasil pemetaan kemiskinan dan hasil FGD yang dibahas dalam tulisan ini merupakan salah satu bukti manfaat pengombinasian kedua pendekatan dalam upaya penyempurnaan pemetaan kemiskinan.

Di satu sisi, kenyataan bahwa dalam batas-batas tertentu terlihat adanya konsistensi antarhasil kedua pendekatan tersebut tentunya meningkatkan kredibilitas hasil kedua pendekatan ini. Namun, di sisi lain, adanya perbedaan juga memunculkan pemahaman akan perlunya perbaikan metodologi pada kedua pendekatan tersebut. Dari aspek pendekatan partisipatoris, tampak bahwa analisis untuk kondisi “saat ini” lebih baik dibandingkan dengan analisis yang didasarkan pada ingatan akan kondisi “di masa lalu”. Dilihat dari aspek pemetaan kemiskinan, tampaknya masih diperlukan upaya penyempurnaan model estimasi pemetaan kemiskinan, khususnya untuk daerah perkotaan dan semiperkotaan. ■

#### DAFTAR ACUAN

- Kanbur, Ravi, ed. (2003) ‘Qualitative and Quantitative Poverty Appraisal: The State of Play and Some Questions’ [Penilaian Kualitatif dan Kuantitatif atas Kemiskinan: Situasinya dan Beberapa Pertanyaan] dalam *Q-Squared—Qualitative and Quantitative Methods of Poverty Appraisal*. Permanent Black, Delhi, hlm. 22-27
- Suharyo, Widjajanti I., Syaikh Usman, Sri Kusumastuti Rahayu, Sri Budiyati, Sulthon Mawardi, Alma Arief, Herry Widjanarko (2003) ‘A Consolidation of Participatory Poverty Assessments in Indonesia, Volume I: Understanding the Voice of the Poor: Input for the Formulation of the Poverty Reduction Strategy Paper’ [Konsolidasi Kajian Kemiskinan Partisipatoris di Indonesia, Volume I: Memahami Suara Orang Miskin: Masukan untuk Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan]. Research Report. Jakarta: The SMERU Research Institute
- Suharyo, Widjajanti I., Akhmadi, Hastuti, Rizky Fillaili, Sri Budiyati, dan Wawan Munawar (2005) ‘Developing a Poverty Map for Indonesia: A Tool for Better Targeting in Poverty Reduction and Social Protection Programs, Book 4: Field Verification’ [Pengembangan Peta Kemiskinan untuk Indonesia: Instrumen untuk Penetapan Sasaran yang Lebih Baik bagi Program Penanggulangan Kemiskinan, Buku 4: Verifikasi Lapangan]. Research Report. Jakarta: The SMERU Research Institute
- Suryahadi, Asep, Wenefrida Widyanti, Rima Prama Artha, Daniel Perwira, Sudarno Sumarto (2005) ‘Developing a Poverty Map for Indonesia: A Tool for Better Targeting in Poverty Reduction and Social Protection Programs, Book 1: Technical Report’ [Pengembangan Peta Kemiskinan untuk Indonesia: Instrumen untuk Penetapan Sasaran yang Lebih Baik bagi Program Penanggulangan Kemiskinan, Buku 1: Laporan Teknis]. Research Report. Jakarta: The SMERU Research Institute

*and in the measured variables, lately there have been more efforts to use the strengths of both approaches to gain better analysis results (Kanbur 2003). Comparisons between the poverty mapping and FGD results discussed in this article are evidence of the usefulness of combining these two approaches in the efforts to improve poverty mapping.*

*On the one hand, the fact that within certain limitations there is consistency between the results from both approaches increases the credibility of these two approaches. However, on the other hand, the existence of differences gives the sense that there needs to be improvements to the methodology of both approaches. From the perspective of the participatory approach, it seems that the analysis for the “current condition” is better than that of the analysis based on the memory of the condition “in the past”. From the perspective of the poverty mapping approach, it seems that efforts are still required to improve the poverty mapping estimation model, particularly for semi-urban and urban areas. ■*

#### LIST OF REFERENCES

- Kanbur, Ravi, ed. (2003) ‘Qualitative and Quantitative Poverty Appraisal: The State of Play and Some Questions’ in *Q-Squared—Qualitative and Quantitative Methods of Poverty Appraisal*. Permanent Black, Delhi, pp. 22-27
- Suharyo, Widjajanti I., Syaikh Usman, Sri Kusumastuti Rahayu, Sri Budiyati, Sulthon Mawardi, Alma Arief, and Herry Widjanarko (2003) ‘A Consolidation of Participatory Poverty Assessments in Indonesia, Volume I: Understanding the Voice of the Poor: Input for the Formulation of the Poverty Reduction Strategy Paper.’ Research Report. Jakarta: The SMERU Research Institute
- Suharyo, Widjajanti I., Akhmadi, Hastuti, Rizky Fillaili, Sri Budiyati, and Wawan Munawar (2005) ‘Developing a Poverty Map for Indonesia: A Tool for Better Targeting in Poverty Reduction and Social Protection Programs. Book 4: Field Verification.’ Research Report. Jakarta: The SMERU Research Institute
- Suryahadi, Asep, Wenefrida Widyanti, Rima Prama Artha, Daniel Perwira, Sudarno Sumarto (2005) ‘Developing a Poverty Map for Indonesia: A Tool for Better Targeting in Poverty Reduction and Social Protection Programs. Book 1: Technical Report.’ Research Report. Jakarta: The SMERU Research Institute



# PEMANFAATAN PETA KEMISKINAN INDONESIA 2000 USES OF THE POVERTY MAP OF INDONESIA 2000

Hastuti\*



Penghitungan angka kemiskinan wilayah kecil oleh Lembaga Penelitian SMERU telah menghasilkan peta kemiskinan sampai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan untuk 30 provinsi di Indonesia yang disajikan dalam bentuk CD interaktif, “Peta Kemiskinan Indonesia 2000.” Sejak awal hingga pertengahan 2005, lebih dari 400 keping CD interaktif telah disebar ke berbagai pemangku kepentingan. Untuk mengetahui pemanfaatan dan memperoleh masukan bagi perbaikan penyajian CD, pada Agustus–September 2006 SMERU melakukan kajian kualitatif singkat dengan mewawancarai berbagai pemangku kepentingan yang telah menerima CD interaktif tersebut. Berikut adalah hasil kajian tersebut.

## Penilaian Umum

Penerima CD interaktif yang berhasil dihubungi berjumlah 126 orang dan 69 orang di antaranya menyatakan pernah memanfaatkan CD. Berdasarkan latar belakang kelembagaan, lembaga/individu yang memanfaatkan CD adalah organisasi nonpemerintah atau ornop (26%), instansi pemerintah di tingkat pusat (23%), lembaga donor atau proyek kerja sama internasional (19%), universitas atau lembaga penelitian (16%), pemerintah daerah (7%), perusahaan atau asosiasi pengusaha (6%), dan lembaga atau individu lain (3%).

Based on its small area poverty estimation, The SMERU Research Institute has constructed a poverty map down to the kecamatan (subdistrict) and village/kelurahan<sup>1</sup> level for 30 provinces in Indonesia. This map was provided in the form of an interactive CD, “Poverty Map of Indonesia 2000”. During the first half of 2005, more than 400 of these interactive CDs were distributed to various stakeholders. In order to find out about the uses of the CD and to gain input on how to improve the presentation of the CD, SMERU conducted a brief qualitative study from August–September 2006. This study involved interviewing various stakeholders who received the Poverty Map CD. The results of the study are outlined below.

## General Appraisal

From the 126 interactive CD recipients that were successfully contacted, 69 stated that they had used the CD. Based on the background of the organization, the organizations/individuals that used the CD were nongovernment organizations (26%), government agencies at the central level (23%), donor organizations or joint international projects (19%), universities or research institutes (16%), regional governments (7%), companies or business associations (6%), and other organizations or individuals (3%).

\* Hastuti adalah peneliti Lembaga Penelitian SMERU.

\* Hastuti is a researcher at The SMERU Research Institute.

<sup>1</sup> A kelurahan is a village level administrative area located in an urban center.

Mereka yang memanfaatkan Peta Kemiskinan SMERU mengemukakan beberapa alasan yang menyebabkan mereka menggunakan Peta Kemiskinan SMERU, antara lain adalah: (1) Peta Kemiskinan SMERU menyediakan informasi kemiskinan yang detail sampai tingkat desa/kelurahan; (2) isi Peta Kemiskinan SMERU sesuai dengan kebutuhan; (3) Peta Kemiskinan SMERU menyajikan informasi kemiskinan dalam bentuk peta sehingga mudah dibaca, mudah dimengerti, dan cepat dalam mencari wilayah miskin; dan (4) tampilan Peta Kemiskinan SMERU menarik dan strukturnya mudah dimengerti, informatif, serta sistematis. Sementara itu, alasan yang dikemukakan oleh mereka yang belum atau tidak memanfaatkan Peta Kemiskinan SMERU antara lain karena data sudah lama sehingga dikhawatirkan tidak menggambarkan kondisi kemiskinan terkini atau karena belum ada kegiatan yang membutuhkan informasi yang tersedia dalam CD tersebut.

Cukup banyak informan yang menilai bahwa informasi yang terdapat dalam CD akan dapat bermanfaat bagi banyak pihak. Oleh karena itu, sekitar 25% informan telah memberikan CD interaktif ini kepada pihak lain. Sebagian dari mereka meminta CD tambahan dari SMERU untuk diberikan kepada pihak lain. Sebagian lagi menggandakan sendiri CD yang mereka miliki, bahkan dua ornop yang ditemui telah menggandakan CD dalam jumlah cukup banyak untuk dibagikan kepada ornop lain dalam jaringan mereka, dan sebagai materi bagi peserta pelatihan yang mereka selenggarakan. Di samping itu, ada juga informan (4%) yang meminjamkan CD yang mereka miliki kepada pihak lain.

### Jenis Pemanfaatan CD

Jenis pemanfaatan CD interaktif bervariasi dan sebagian informan telah menggunakannya untuk beberapa jenis pemanfaatan dan masih berencana menggunakannya untuk keperluan lain. Secara total, terdapat 106 jenis pemanfaatan, antara lain untuk referensi tulisan, baik untuk membuat laporan, makalah, artikel, maupun penulisan buku (27%), penentuan target wilayah pelaksanaan program atau kegiatan (21%), dan untuk bahan presentasi, diskusi, pelatihan, dan advokasi (16%). Berikut adalah contoh pemanfaatan CD interaktif oleh beberapa lembaga.

#### Asisten Deputi Bidang Ekonomi Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan

Asisten Deputi (Asdep) Bidang Ekonomi Keluarga, Kementerian Pemberdayaan Perempuan yang menerima CD saat SMERU menyelenggarakan seminar peluncuran CD pada tahun 2005 menilai CD interaktif menarik, mudah dibaca, dan sangat informatif karena menyediakan data sampai tingkat desa dan kelurahan. Karena menyediakan data yang cukup detail, CD bisa digunakan sebagai bahan perencanaan kebijakan. Akan tetapi, data yang digunakan tidak muktakhir sehingga informasi dalam CD hanya bisa digunakan untuk gambaran umum wilayah, sementara untuk penentuan kebijakan harus menggunakan data terbaru karena kondisi wilayah terus mengalami perubahan, apalagi jumlah kabupaten/kota dan provinsi pun bertambah terus.

*Those who used the SMERU Poverty Map provided a number of reasons about why they were using the map, including: (1) the SMERU Poverty Map provides detailed information on poverty down to the village/kelurahan level; (2) the contents of the SMERU Poverty Map were in line with their needs; (3) the SMERU Poverty Map provides information on poverty in the form of a map thus it is easy to read, easy to understand, and a quick way of finding poor areas; and (4) the presentation of the SMERU Poverty Map is interesting and the structure is easily understood, informative, and systematic. Meanwhile, those who had not used the SMERU Poverty Map stated that this was because the data was out of date so they were concerned that the CD did not represent the most up-to-date poverty conditions or because they did not have any activities that required the information provided on the CD.*

*Many informants believed that the information available on the CD would be beneficial for many parties. Thus, approximately 25% of informants had given the CD to another party. Some of them requested an extra CD from SMERU to give to a colleague. Others duplicated the CD themselves; two NGOs copied the CD in a large number for distribution to other NGOs within their network and to be used as material for participants in their training program. Some informants (4%) lent their CD to another party.*

### Uses of the CD

*The uses of the interactive CD were varied and some informants had used the CD in a number of ways and planned to use it for other purposes as well. In total, there were 106 different uses, among others, as a reference for a report, paper, article, or book (27%), to determine the target area for implementing a program or activity (21%), and as a reference for a presentation, discussion, training, or advocacy activity (16%). Following are a number of examples of uses of the interactive CD by various organizations.*

#### Deputy Assistant for Family Economy Sector, Ministry of Women's Empowerment

*The deputy assistant of the family economy sector of the Ministry of Women's Empowerment, who received the CD during a seminar held by SMERU to launch the CD, stated that the interactive CD was interesting, easy to read, and very informative because it provided data down to the village and kelurahan level. Because the CD provides detailed data, it can be used as a reference when planning policies. However, the data used is not the most up to date data thus the information in the CD can only be used to gain a general picture of a region, while the most recent data is needed to determine policies because the regional conditions are constantly changing and even the total number of kabupaten/kota (districts/cities) and provinces is constantly increasing.*



Pada seminar peluncuran CD Peta Kemiskinan SMERU 2005, CD ini dianggap sebagai sumber acuan bagi perencanaan kebijakan karena menyediakan informasi yang cukup rinci.

*At the launch of The SMERU Poverty Map in 2005, the CD was acknowledged as a reference for policy planning due to the detailed information that it provides.*



Asdep Bidang Ekonomi Keluarga menggunakan Peta Kemiskinan SMERU untuk mengecek lima wilayah pelaksanaan Program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) 2005 yang sudah dipilih sebelum CD diperoleh. Pengecekan dilakukan untuk memastikan bahwa kabupaten yang terpilih merupakan daerah miskin, sedangkan untuk tingkat desa tidak dilakukan karena merupakan wewenang masing-masing kabupaten.

Karena menilai Peta Kemiskinan SMERU dapat bermanfaat bagi pihak lain, Asdep Bidang Ekonomi Keluarga meminta tambahan CD yang kemudian dibagikan ke bagian lain di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan lembaga lain yang juga turut memanfaatkan Peta Kemiskinan SMERU. Asdep Pengarusutamaan Gender misalnya, pernah menggunakan Peta Kemiskinan SMERU dalam diskusi kajian kemiskinan di wilayah perbatasan, dan bagian Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan telah menggunakan Peta Kemiskinan SMERU untuk menentukan lokasi bagi usulan program pelatihan prakeberangkatan tenaga kerja Indonesia (TKI) pada 2005.

#### **Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP)**

Direktorat Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) memperoleh CD interaktif dari seminar SMERU dan pemberian lembaga lain. Isi Peta Kemiskinan SMERU dinilai sangat komunikatif dan mampu menyediakan data kemiskinan Indonesia terinci sampai tingkat desa/kelurahan.

Di lembaga ini, Peta Kemiskinan SMERU sudah digunakan untuk berbagai jenis pemanfaatan, yaitu (1) bahan penulisan artikel "Ditjen P3K Lakukan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Masyarakat Pesisir" yang diterbitkan pada 2005 dalam website DKP; (2) basis data kemiskinan wilayah pesisir yang dibandingkan dengan data BPS tentang wilayah pesisir-nonpesisir dan perikanan-

*The deputy assistant of the family economy sector used the SMERU Poverty Map to check five regions where the Program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (Increasing Women's Economic Productivity Program) was being implemented, which had already been selected before the CD was obtained. These checks were made to ensure that the kabupaten selected were in fact poor areas, while at the village level they were not carried out because these are under the authority of the respective kabupaten.*

*Because the deputy assistant felt the SMERU Poverty Map was useful for others, she requested more CDs which were then given to other parties within the Ministry of Women's Empowerment's department and other institutions which could also make use of the SMERU Poverty Map. For example, the deputy assistant of gender mainstreaming has used the SMERU Poverty Map in a poverty study discussion in border regions, and the Protection of Female Workers sector has used the SMERU Poverty Map to determine which locations should be used for proposals for the pre-departure training program for Indonesian foreign workers (TKI) in 2005.*

#### **Directorate for the Economic Empowerment of Coastal Communities, Ministry of Marine Affairs and Fisheries (DKP)**

*The Directorate for the Economic Empowerment of Coastal Communities, Ministry of Marine Affairs and Fisheries obtained the interactive CD from a SMERU seminar and also received a copy from another organization. The contents of the SMERU Poverty Map were considered to be very communicative and capable of providing detailed data on poverty in Indonesia, down to the village/kelurahan level.*

*In this organization, the SMERU Poverty Map was used in various ways, (1) as a reference in writing the article "Ditjen P3K Lakukan Penyusunan Indikator Kesejahteraan Masyarakat Pesisir" [Directorate General for Coasts and Small Islands Compiles Welfare Indicators for Coastal Communities] which was published on the DKP*



nonperikanan. Hasil pengolahan kedua sumber data tersebut menghasilkan daftar wilayah pesisir beserta tingkat kemiskinannya. *Print out* daftar wilayah tersebut dibagikan kepada Dinas Perikanan atau Dinas Kelautan tingkat kabupaten dan kota di seluruh Indonesia untuk dijadikan bahan pelaksanaan program. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya tidak semua kabupaten/kota berpatokan pada data tersebut dalam menentukan wilayah sasaran program karena adanya pertimbangan lain, seperti pertimbangan politik; (3) data acuan utama penetapan kabupaten/kota miskin sasaran Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dengan memperhatikan data pelaksanaan program DKP sebelumnya; dan (4) bahan presentasi DKP di setiap kesempatan hingga seminar di tingkat Asia Pasifik yang terutama menyajikan peta kondisi kemiskinan tingkat kabupaten/kota dan data persentase wilayah pesisir yang miskin.

#### Department for International Development of The United Kingdom (DFID)

DFID adalah salah satu lembaga donor internasional yang menerima CD interaktif Peta Kemiskinan saat SMERU menyelenggarakan seminar. Lembaga ini tertarik dengan Peta Kemiskinan SMERU karena selain warna yang ditampilkannya menarik juga bisa memberi gambaran kemiskinan wilayah sampai unit terkecil, yakni kelurahan/desa. Lembaga ini menggunakan peta ini antara lain untuk menentukan target wilayah, membuat perbandingan situasi kemiskinan wilayah kunjungan karena informasi dalam CD dapat digunakan sebagai data relatif, dan untuk ditunjukkan kepada masyarakat di wilayah kunjungan.

DFID juga turut menyebarkan sekitar 30 keping CD kepada NGO di daerah, seperti Lembaga Pengembangan Masyarakat Pesisir dan Pedalaman (Lepmil) di Kendari, Jaringan Informasi se-Jawa atau Java Learning Center di Yogya, perguruan tinggi (UGM), dan Pemda Bulukumba serta Pemda Papua. Penyebaran CD juga dilakukan melalui Multistakeholders Forestry Program-MFP (unit kerja sama DFID dengan Departemen Kehutanan untuk pelayanan publik, advokasi, dan pengembangan masyarakat di kawasan hutan) kepada mitra yang tergabung dalam Transform. Transform merupakan sebuah forum akademisi dan pemerhati kebijakan serta pembangunan daerah yang berkedudukan di Mataram. Transform menggunakan data-data dan prinsip-prinsip yang ada dalam Peta Kemiskinan SMERU sebagai materi pembandingan ketika melakukan kajian terhadap data kemiskinan tingkat lokal, sebagai referensi dalam penulisan buku *Dinamika Hubungan Kemiskinan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kasus Pulau Lombok*, yang disponsori WWF, dan sebagai referensi untuk membantu tim asistensi di pemda dalam hal alokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan mengkaji kebijakan penanggulangan kemiskinan. Dengan menggunakan CD Peta Kemiskinan SMERU, Transform berharap pemda dapat terdorong untuk memanfaatkan berbagai referensi dalam penentuan kebijakan. Transform juga tengah mempersiapkan program penanggulangan masyarakat miskin yang juga direncanakan akan memanfaatkan CD Peta Kemiskinan tersebut.

*website in 2005; (2) the basis for regional poverty data for coastal communities accompanied with BPS data on coastal-noncoastal and fishery-nonfishery regions. The result of tabulating these two data sources resulted in a list of coastal regions as well as their poverty levels. A print out of the list of these regions was given to the fisheries or marine affairs office at the kabupaten and kota level throughout Indonesia to be used as material for the implementation of the program. Despite this, during the implementation not all kabupaten/kota referred to the data mentioned in determining the target regions of the program because there were other issues, such as political considerations; (3) as the main reference data for targeting poor kabupaten/kota as recipients of the Economic Empowerment of Coastal Communities Program by taking into account the data in the implementation of the previous DKP programs; and (4) DKP presentation material at every opportunity, even at a seminar at the Asia Pacific level which specifically provided a map on the poverty condition at the kabupaten/kota level and data on the percentage of poor coastal areas.*

#### Department for International Development of The United Kingdom (DFID)

*DFID is an international donor agency which received the interactive Poverty Map CD during a SMERU seminar. This organization was interested in the map because of the attractive colors used in the map and also because it gives a picture of regional poverty down to the lowest level, the kelurahan/village. This organization used the map to determine regions to target, to compare the condition of poverty between visited regions (because the information in the CD can be used as relative data), and to be shown to the communities in the areas they were visiting.*

*DFID also distributed approximately 30 copies of the CD to NGOs in regional areas, such as Institute for the Development of Coastal and Inland Communities (Lepmil) in Kendari, Java Learning Center in Yogyakarta, universities (Universitas Gadjah Mada), and the regional governments of Bulukumba and Papua. The distribution of the CD also took place through the Multistakeholders Forestry Program (a DFID unit working together with the Ministry of Forestry for public service, advocacy, and development of communities in forest areas) to partners which are part of Transform. Transform is an academic and policy and regional development observer forum located in Mataram. Transform used the data and principles from the SMERU Poverty Map as comparative material when conducting studies of poverty data at the local level, as a reference for the book "Dinamika Hubungan Kemiskinan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, Kasus Pulau Lombok" [The Dynamics of the Relationship between Poverty and the Management of Natural Resources, The Case of Lombok] which was sponsored by the WWF, and as a reference to help the assistance team in regional governments with budget allocations, activity implementation, and to examine the policies to overcome poverty. By using SMERU's Poverty Map CD, Transform hopes that regional governments will be encouraged to use a variety of references in policy making. Transform is also in the middle of preparing a poverty reduction program which also plans to use the Poverty Map CD.*

### Gerakan Anti Pemiskinan Rakyat Indonesia (GAPRI)

GAPRI yang merupakan aliansi beberapa LSM seperti International NGO Forum on Indonesian Development (Infid), Yayasan Mitra Usaha (YMU), Yayasan Penguatan Partisipasi, Inisiatif, dan Kemitraan Masyarakat Indonesia (YAPPIKA), dan Kelompok Kerja Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan Struktural (KIKIS) berpendapat bahwa CD interaktif merupakan upaya pertama yang mengkompilasi data kemiskinan dalam bentuk peta sehingga memudahkan dalam melakukan identifikasi. Keberadaan Peta Kemiskinan SMERU yang ramah pengguna (*user friendly*) tersebut dinilai sangat penting bagi NGO karena dapat menjadi materi pembandingan terhadap kondisi kemiskinan lokal. Meski kondisi kemiskinan wilayah masih bisa diperdebatkan karena asumsi dan indikator kemiskinan di setiap wilayah berbeda-beda, namun GAPRI berpendapat bahwa Peta Kemiskinan SMERU ini penting sebagai titik awal untuk mengidentifikasi kemiskinan wilayah dan membantu masyarakat lokal dalam menyusun asumsi dan indikator kemiskinan lokal di daerahnya. Di beberapa daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel), GAPRI menemui para pejabat lokal yang sempat mempertanyakan indikator yang ada dalam Peta Kemiskinan SMERU tersebut karena dianggap tidak sesuai dengan keadaan dan asumsi kemiskinan di daerah masing-masing. Namun, semuanya sepakat bahwa Peta Kemiskinan SMERU tersebut dapat menjadi pembuka jalan dan pembandingan yang amat bermanfaat untuk melakukan analisis kemiskinan partisipatoris oleh masyarakat.

GAPRI juga pernah memanfaatkan data dalam Peta Kemiskinan SMERU untuk melakukan advokasi terhadap LSM di lima kabupaten di Sulawesi Selatan yang terlibat dalam Forum Informasi Komunikasi LSM se-Sulsel. Peta Kemiskinan SMERU tersebut dianggap dapat diterapkan untuk kegiatan analisis kemiskinan partisipatoris sehingga beberapa LSM tersebut menggunakannya sebagai pembandingan dalam penerapan metode KKP (kajian kemiskinan partisipatoris).

### Movement for Anti-impoverishment of Indonesian People (GAPRI)

*GAPRI is an alliance of a number of NGOs such as the International NGO Forum on Indonesian Development (Infid), Business Partners Foundation (YMU), Foundation for the Participatory, Initiative, and Partnership Strengthening of the Indonesian Community (YAPPIKA), and Indonesian Working Group for Eradicating Structural Poverty (KIKIS). GAPRI believes that the interactive CD is the first such effort to compile poverty data in the form of a map, thus making it easier to make identifications. The user-friendly SMERU Poverty Map is considered very important for this NGO because it can be used as comparative material in relation to the local poverty condition. While the condition of poverty in the regions is debatable because poverty assumptions and indicators in each region are different, GAPRI believes that the SMERU Poverty Map is an important starting point in identifying poor regions and helping local communities to formulate local poverty assumptions and indicators for their own region. In a number of areas in South Sulawesi, GAPRI found that local officials questioned some of the indicators on the SMERU Poverty Map because they considered the information did not accurately reflect the reality and the poverty assumptions in the respective regions. However, all agreed that the SMERU Poverty Map could be a very useful introduction and comparative data for the community when conducting participatory poverty assessment.*

*GAPRI also used the data from the SMERU Poverty Map to carry out advocacy for NGOs in five kabupaten in South Sulawesi which are involved in the South Sulawesi NGO Communication and Information Forum. The SMERU Poverty Map was considered relevant for participatory poverty analysis activities, so some NGOs used the data as a comparison in the application of the participatory poverty analysis (PPA) method.*



Justin Sodo/SMERU

Peta Kemiskinan SMERU dapat digunakan untuk penentuan target wilayah pelaksanaan program atau kegiatan.

*The SMERU Poverty Map can be used to determine the targeted regions of a program or activity.*

## Saran Pengguna CD

Karena cukup banyak lembaga/individu yang memanfaatkan Peta Kemiskinan SMERU dan berharap dapat lebih meningkatkan pemanfaatannya, SMERU melakukan perbaikan tampilan CD interaktif Peta Kemiskinan dan memperbanyaknya. Perbaikan dilakukan antara lain berdasarkan masukan dari para informan karena hampir semua informan (88%) memberi saran perbaikan CD. Akan tetapi saran tentang pemutakhiran data yang disampaikan oleh sekitar 36 informan belum dapat dilakukan karena sangat tergantung pada ketersediaan data. Data sensus penduduk misalnya, baru dapat diperoleh paling cepat pada 2010, karena sensus penduduk di Indonesia hanya dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, sementara sensus terakhir dilakukan pada 2000 yang lalu. Selain itu, DKP menyarankan agar Peta Kemiskinan SMERU dilengkapi dengan informasi kualitatif tentang kondisi geografis, seperti wilayah pesisir atau bukan, belum bisa diakomodasi karena berimplikasi pada pengolahan ulang data yang memerlukan waktu cukup lama. ■

## Users' Suggestions

*Due to the large number of organizations/individuals who used the SMERU Poverty Map and also hoped the usefulness of the map would be increased, SMERU improved the appearance of the interactive Poverty Map CD and made more copies of the CD. The improvements were carried out based on input from informants because almost all informants (88%) gave suggestions on how to improve the CD. However, the suggestion on using up-to-date data, given by approximately 36 informants, has not yet been carried out because this is very dependent on data availability. For example, population census data will only be obtained at the earliest in 2010, because Indonesia's population census only takes place every 10 years, and the last census was in 2000. Aside from that, the DKP's suggestion that the SMERU Poverty Map be supplemented by qualitative information about the geographical condition, such as whether regions are coastal or not, has yet to be accommodated because this would require re-tabulation of data which requires much time. ■*

## Mengintip Kegiatan SMERU/What's up at SMERU.

**9 April. Seminar Internal Mengukur Kesejahteraan dengan Menggunakan Indeks Aset.** Seminar ini dilaksanakan di kantor SMERU dengan pembicara tamu Matthew Wai-Poi dari Colombia University. Wai-Poi mempresentasikan metode baru pengukuran kesejahteraan dengan menggunakan analisis multivariat, khususnya komponen prinsip dan analisis faktor. Indeks aset semakin banyak digunakan baik oleh peneliti maupun pembuat kebijakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi. Di Indonesia metode ini telah digunakan oleh beberapa lembaga.

**17 April. Seminar Internal tentang Evaluasi dan Pemantauan Kesejahteraan oleh Masyarakat.** Seminar ini bertujuan untuk berbagi pengalaman SMERU dan asosiasi Peningkatan Keberdayaan Masyarakat (PKM) dalam melakukan penelitian dan kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Peneliti SMERU memaparkan pengalaman mereka melaksanakan kegiatan analisis kemiskinan partisipatoris (AKP) di Nias dan Aceh serta proyek sistem pemantauan kesejahteraan oleh masyarakat (SPKM).

**24 Juli. Internal Seminar tentang Manusia Gerobak: Suatu Kajian mengenai Taktik-Taktik Adaptif Pemulung Perkotaan di Jatinegara.** Abdul Ghofur (Gerakan Anti-Pemiskinan Republik Indonesia/GAPRI) mempresentasikan hasil penelitiannya mengenai strategi bertahan hidup manusia gerobak di sekitar Jatinegara. Ia mengemukakan bahwa fleksibilitas struktur telah memungkinkan pemulung bergerobak untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan ekonomi untuk menghidupi keluarga mereka. Penelitian ini didanai oleh SMERU.

**28 Agustus. Lokakarya Nasional tentang Konsekuensi Ekonomi Bom Bali dan Jakarta.** Lokakarya yang diselenggarakan SMERU di Hotel Cemara Jakarta ini menyajikan temuan awal kajian SMERU mengenai dampak ekonomi akibat ledakan bom di Bali dan Jakarta. Studi ini antara lain menemukan bahwa pemboman ini berdampak pada pariwisata, industri kecil dan menengah, serta tingkat pengangguran di Bali. Peserta lokakarya mencakup antara lain Departemen Hubungan Luar Negeri (DFAT) Australia, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, dan Kemitraan Australia-Indonesia untuk Studi mengenai Tata Kelola Pemerintahan (AIGRP).

**9 April. Internal Seminar on the Measuring of Well-being Using Assets Index.** This seminar was held at SMERU with guest speaker Matthew Wai-Poi from Colombia University. Wai-Poi presented his new method of economic well-being measurement that uses multivariate analysis, in particular principal component and factor analysis. An asset index is increasingly used by both researchers and policy makers to measure economic well-being. In Indonesia this method has been used by several institutions.

**17 April. Internal Seminar on Community-Based Monitoring and Evaluation.** This seminar was a chance for SMERU and the Association for Community Empowerment (ACE) to share experiences on conducting research and community participation activities. SMERU researchers discussed their participatory poverty assessment activities (PPA) in Nias and Aceh as well as the community-based monitoring system (CBMS) projects.

**24 July. Internal Seminar on the Survival Strategies of Urban Scavengers in the Jatinegara Area.** Abdul Ghofur (Movement for Anti-impoverishment of Indonesian People/GAPRI) presented his research findings on the survival mechanisms of the Jakarta cart-scavenger (manusia gerobak) that live around the Jatinegara area. He argued that flexibility within the structure enabled cart-scavengers to utilize economic opportunities to support their families. This research is funded by SMERU.

**28 August. National Workshop on the Economic Consequences of the Bali and Jakarta Bombings.** This workshop, organized by SMERU at the Hotel Cemara, Jakarta, presented the draft findings of SMERU's study looking at the consequences of the Bali and Jakarta bombings. The study found, among others, that the bombings in Bali particularly affected local tourism, small and medium industries, and the unemployment rate. Participants included DFAT (Department of Foreign Affairs and Trade) Australia, the Coordinating Ministries for Social Welfare and Economic Affairs; Department of Culture and Tourism; and the Australia-Indonesia Governance Research Partnership (AIGRP).

# MENGENANG WENEFRIDA DWI WIDYANTI: JEJAKMU TAK BERKESUDAHAN *REMEMBERING WENEFRIDA DWI WIDYANTI: AN EVERLASTING LEGACY*

Justin Sodo & Sudarno Sumarto\*



Stella Hutagaung/SMERU

## Sejarah Pendidikan

Almarhumah Wenefrida yang kerap disapa Wina lahir pada 3 November 1969 sebagai anak kedua dari pasangan guru SMP Ramelan Broto Siswanto dan guru SD M.A. Sukarti. Ayahanda almarhumah meninggal ketika almarhumah masih berusia 4 tahun. Bersama dua saudara lainnya, ia dibesarkan oleh ibunya dari hasil sulaman tangan dan penjualan kerupuk kedelai serta uang pensiun Ayahanda Wina. Beasiswa yang diberikan komunitas gereja kepada Wina dan kakak-adiknya membantu meringankan biaya pendidikan mereka. Almarhumah menyelesaikan seluruh pendidikan dasar dan menengah di kota kelahirannya, Salatiga. Kecerdasan dan keuletannya sudah tampak semenjak duduk di bangku sekolah

\* Justin Sodo adalah Editor Lembaga Penelitian SMERU dan Sudarno Sumarto adalah Direktur SMERU.

## Education

The late Wenefrida Dwi Widyanti, also known as Wina, was born on 3 November 1969, the second child to junior high school teacher Ramelan Broto Siswanto and primary school teacher M.A. Sukarti. Wina's father passed away when she was 4 years old. She and her two siblings were brought up by her mother. Her mother made ends meet by working as an embroiderer, selling soybean crackers, and using her husband's pension fund. Scholarships from church communities awarded to Wina and her siblings also helped to reduce the burden of the children's education expenses. She completed her primary and high school education in her place of birth, Salatiga. Her intelligence and persevering nature

\* Justin Sodo is an editor at The SMERU Research Institute and Sudarno Sumarto is the director of SMERU.

dasar St. Theresia, Salatiga. Menurut seorang rekan, ia selalu meraih peringkat teratas selama duduk di sekolah dasar.

Setelah menamatkan pendidikan menengah atas di SMAN Salatiga, almarhumah melanjutkan pendidikan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1988 dan memilih jurusan Matematika. Pilihan inilah yang akhirnya mengantarnya menjadi salah satu peneliti kuantitatif handal selama 8 tahun berkarya di Lembaga Penelitian SMERU.

Keinginan yang kuat untuk menggali sebanyak mungkin ilmu statistik yang ia geluti menjadi terbuka pada 2004 melalui beasiswa STUNED untuk mengikuti program S2 di University of Groningen di negeri Belanda dan memilih *Population Studies* sebagai subjek studinya. Wina tamat pada Agustus 2005 dan menyandang gelar MSc setelah menyelesaikan tesis berjudul: "Apakah Perubahan-perubahan Sosial-ekonomi Memengaruhi Status Kesehatan Anak-anak? Bukti dari Survei Kehidupan Keluarga Indonesia."

### Karier dan Karya

Ia memulai karier profesionalnya di salah satu perusahaan komputer di Kota Semarang selama 5 tahun. Pada 1998, kariernya mulai menanjak saat ia diterima sebagai salah satu staf di Biro Pembangunan dan Analisis Statistik, BPS, Jakarta. Kepiawaiannya dalam bidang kuantitatif menarik minat SMERU-Bank Dunia pada 2000 untuk mengangkatnya sebagai seorang analis data junior. Saat Lembaga Penelitian SMERU menjadi lembaga penelitian independen pada 2001, almarhumah pun diangkat sebagai salah satu peneliti kuantitatif. SMERU menjadi pelabuhan terakhir dalam sejarah kariernya.

*were obvious from when she first sat down in her primary school at St. Theresia, Salatiga. According to one of her friends, she always ranked highest in the class throughout primary school.*

*After concluding her high school education in Salatiga, Wina continued her studies at Gadjah Mada University, Yogyakarta in 1988, majoring in Mathematics. It was this choice which eventually led to her becoming a highly capable quantitative researcher for 8 years at The SMERU Research Institute.*

*Her strong desire to gain as much knowledge as possible in the field of statistics was realized in 2004 when she received a STUNED scholarship for a master's degree at the University of Groningen in the Netherlands. Here, Wina chose to study Population Studies. Wina completed her master's degree in August 2005 and received her MSc after finishing her thesis: "Did Socioeconomic Changes Affect the Health Status of Children? Evidence from the Indonesian Family Life Surveys."*

### Career and Works

*Wina began her professional career at a computer company in Semarang where she worked for five years. In 1998 her career began to take off when she was accepted as a member of staff at the Statistical Analysis and Development Bureau, Statistics Indonesia, Jakarta. Her expertise in the quantitative sector drew the interest of SMERU-World Bank to recruit Wina and appoint her as a junior data analyst in 2000. When The SMERU Research Institute became independent in 2001, Wina was appointed as a quantitative researcher. SMERU was to be the final destination in her career.*

**Tabel 1. Laporan yang Ditulis Bersama Wina/ Table 1. List of Reports Co-authored by Wina**

No.	Judul Laporan/Report Title
1	<i>The State of Local Governance and Public Services in the Decentralized Indonesia in 2006: Findings from the Governance and Decentralization Survey 2 (GDS2)</i>
2	<i>Kajian Cepat PKPS-BBM Bidang Pendidikan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 2005/A Rapid Appraisal of The PKPS-BBM Education Sector School Operational Assistance (BOS)</i>
3	<i>From Access to Income: Regional and Ethnic Inequality in Indonesia</i>
4	<i>Kajian Cepat Pelaksanaan Subsidi Langsung Tunai Tahun 2005 di Indonesia: Studi Kasus di Lima Kabupaten/Kota (Rapid Appraisal of the Implementation of the 2005 Direct Cash Transfer Program in Indonesia: Case Study in Five Kabupaten/Kota)</i>
5	<i>Developing a Poverty Map for Indonesia: A Tool for Better Targeting in Poverty Reduction and Social Protection Programs, Book I – III</i>
6	<i>Socioeconomic Impact Evaluation of the Sulawesi Agricultural Area Development Project (SAADP): Lessons Learned from a Micro-Credit Program in Indonesia</i>
7	<i>Developing a Poverty Map for Indonesia: An Initiatory Work in Three Provinces</i>
8	<i>An Impact Evaluation of Systematic Land Titling under the Land Administration Project (LAP)</i>
9	<i>The Impact of Minimum Wage Policy on Wages and Employment in Developing Countries: The Case of Indonesia</i>
10	<i>Short-term Poverty Dynamics: Evidence from Rural Indonesia</i>
11	<i>The Impact of Economic Crisis on Poverty and Inequality in Indonesia', unpublished paper, presented at the Symposium on Poverty Analysis and Data Initiative (PADI)</i>
12	<i>Designs and Implementation of the Indonesian Social Safety Net Programs: Evidence from the JPS Module in the 1999 SUSENAS</i>

**Tabel 2. Artikel yang Ditulis oleh atau Bersama Wina/ Table 2. Articles Written or Co-authored by Wina**

No.	Judul Laporan/Report Title	Buku/Journal
1	<i>Assessing the Impact of Indonesian Social Safety Net Programs on Household Welfare and Poverty Dynamics</i>	<i>European Journal of Development Research</i> , 17(1), March 2005, pp. 155-177
2	<i>Minimum Wage Policy and Its Impact on Employment in the Urban Formal Sector</i>	<i>Bulletin of Indonesian Economic Studies</i> , 39(1), pp. 29-50
3	<i>Short-term Poverty Dynamics in Rural Indonesia during the Economic Crisis</i>	<i>Journal of International Development</i> , 15(2), pp. 133-144
4	<i>The Impact of Economic Crisis on Poverty and Inequality in Indonesia</i>	<i>Impact of the East Asian Financial Crisis Revisited</i> , pp. 117-191, WBI-PIDS, Philippines
5	<i>Poverty in Indonesia: The Impact of Economic Crisis</i>	<i>Economic and Finance in Indonesia</i> , XLX(2), pp. 183-245
6	<i>Designs and Implementation of Indonesian Social Safety Net Programs</i>	<i>Developing Economies</i> , 40(1), pp. 3-31
7	Upah dan Kesempatan Kerja: Dampak Kebijakan Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sektor Formal Perkotaan	<i>Jurnal Analisis Sosial</i> , Vol. 7, No. 1, AKATIGA, Bandung
8	<i>Perkembangan Tingkat Kemiskinan dan Beberapa Dimensi Sosial-Ekonominya 1996-1999: Sebuah Kajian Sederhana</i>	<i>Seri Publikasi Susenas Mini 1999 - Buku 2</i> , BPS, Jakarta, Indonesia, January 2000.

Aneka prestasi dan karya laporan telah dihasilkan Wina. Berikut ini beberapa judul laporan dan karya bersama peneliti SMERU yang telah disumbangkan almarhumah (Tabel 1).

Selain berbagai laporan di atas, tulisan-tulisan bersama juga dimuat di beberapa jurnal nasional dan internasional terkemuka serta buku seperti terlihat pada Tabel 2.

Produktivitas almarhumah juga nampak dari berbagai artikelnnya yang kerap dimuat di dalam berbagai edisi buletin SMERU. Beberapa di antaranya adalah ‘Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Akses terhadap Pendidikan Dasar Bagi Masyarakat Miskin’ (2006); ‘Dampak Program BOS terhadap Penerimaan dan Pengeluaran Sekolah serta Tingkat Kepuasan Pemangku Kepentingan’ (2006); ‘Ketepatan Sasaran Subsidi Langsung Tunai (SLT)’ (2006); ‘Pemetaan Kemiskinan di Indonesia: Metode dan Hasilnya’ (2003); ‘Kondisi Kemiskinan pada Tahun 2000’ (2002); dan ‘Dampak Upah Minimum terhadap Kesempatan Kerja’ (2002).

*Wina made many achievements and completed various research reports during her life. Tabel 1 shows a list of reports co-authored by Wina as part of a team of SMERU researchers.*

*As well as the reports listed above, a number of Wina’s articles written with other authors have been published in leading national and international journals as well as books, as shown in Table 2.*

*Wina’s productivity can also be seen from her various articles published in SMERU’s newsletters. Some of these articles include ‘The School Operational Assistance (BOS) Program and the Poor’s Access to Basic Education’ (2006); ‘The Impact of the BOS Program on School Revenue, Expenditure, and Stakeholders’ Satisfaction’ (2006); ‘Targeting Accuracy of the Direct Cash Transfer Program’ (2006); ‘Poverty Mapping in Indonesia: Methods and Results’ (2003); ‘The State of Poverty in 2000’ (2002); and ‘The Impact of Minimum Wages on Employment’ (2002).*

Wina merupakan salah satu peneliti studi Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada 2006 di Sulawesi Utara.

*Wina was one of the researchers involved in the School Operational Assistance (BOS) study in 2006 in North Sulawesi.*



SMERU



Wina ketika penelitian lapangan Subsidi Langsung Tunai di Tambora, Jakarta pada 2005.

Wina during the Direct Cash Transfer field research in Tambora, Jakarta, 2005.

Karya monumental yang dihasilkan almarhum dan hingga kini selalu mengingatkan SMERU akan pentingnya peran dan kontribusi almarhum adalah pengembangan Peta Kemiskinan Indonesia 2000 untuk seluruh wilayah mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. Tidak hanya itu, almarhum pun berhasil menyusun *'Metode dan Praktik Penyusunan Peta Kemiskinan'* pada Februari 2003 yang kemudian dijadikan sebagai bahan pelatihan.

#### Penghargaan dan Partisipasi dalam Lingkungan Internasional

Pada 2003, almarhumah mendapat penghargaan H.W. Arndt Prize dari *Bulletin of Indonesian Economic Studies* (BIES), sebuah publikasi terkemuka dari Australian National University, atas sebuah makalah yang ditulis bersama, berjudul *'Minimum Wage Policy and Its Impact on Employment in the Urban Formal Sector'*. Selain penghargaan berupa beasiswa dari STUNED Scholarships Award–Netherlands Education Centre pada 2004–2005, almarhumah juga mendapat tawaran beasiswa dari DELTA Scholarships Award–University of Groningen 2004–2005, dan Joint Japan/World Bank Post Graduate Scholarships Program 2004–2005.

Selain berpartisipasi dalam berbagai seminar/lokakarya di dalam negeri, sejak 2001 almarhumah telah ikut aktif menyajikan berbagai makalah kajian SMERU dalam berbagai seminar/lokakarya internasional, antara lain, lokakarya *'Strengthening Poverty Data Collection and Analysis: Impact of the Economic Crisis on Poverty and Inequality'* pada 2001 di Filipina; *'Social Protection in Asia: A Regional Research Initiative'* pada 2004 di Bangkok, Thailand; *'Targeting of Social Protection Programs: Experiences of Indonesia'* pada 2006 di India; *'To What Extent Socioeconomic Changes Affect the Health Status of Children? Evidence from the Indonesian Family Life Surveys'* pada 2006 di Helsinki; dan *'Poverty and Human Security'* pada 2007 di Singapura.

Wina's most monumental piece of work, which will always impress upon SMERU the significance of her role and contribution, was the development of the Poverty Map of Indonesia 2000. Moreover, Wina developed *'Methods and Practices for Compiling a Poverty Map'* (February 2003) which has been used as training material.

#### Awards and Participation in the International Community

In 2003, Wina received the H.W. Arndt Prize from the *Bulletin of Indonesian Economic Studies* (BIES), a leading publication from the Australian National University, for an article she co-authored, titled *'Minimum Wage Policy and Its Impact on Employment in the Urban Formal Sector'*. As well as receiving a scholarship from STUNED Scholarships Award, Netherlands Education Centre in 2004–2005, Wina was also offered a scholarship from DELTA Scholarships Award, University of Groningen 2004–2005, and the Joint Japan/World Bank Post Graduate Scholarships Program 2004–2005.

In addition to participating in various seminars and workshops in Indonesia, since 2001 Wina was actively involved in presenting a number of SMERU research papers in numerous international seminars and workshops. These included, among others, the *'Strengthening Poverty Data Collection and Analysis: Impact of the Economic Crisis on Poverty and Inequality'* workshop in 2001 in the Philippines; *'Social Protection in Asia: A Regional Research Initiative'* in 2004 in Bangkok, Thailand; *'Targeting of Social Protection Programs: Experiences of Indonesia'* in 2006 in India; *'To What Extent Socioeconomic Changes Affect the Health Status of Children? Evidence from the Indonesian Family Life Surveys'* in 2006 in Helsinki; and *'Poverty and Human Security'* in 2007 in Singapore.

Semoga karena kasihNya, ia beroleh istirahat kekal.

*With the love of God, may she rest in peace.*



Hari /SMERU

Lokakarya yang terakhir yang dihadiri almarhumah mewakili SMERU adalah 'Research and Methodology Workshop on Social Protection in Asia' yang diselenggarakan IDS Sussex dan BRAC di Dhaka, Bangladesh pada 29 April–1 Mei 2008. Beberapa minggu kemudian, tepatnya pada 23 Mei, Wenefrida menghembus nafasnya yang terakhir saat menjalani operasi tulang belakang di sebuah rumah sakit di Jakarta.

### Penutup

Profil singkat almarhumah Wenefrida memperlihatkan bahwa almarhumah semasa hidupnya adalah seorang peneliti yang produktif. Dalam kurun waktu sekitar 8 tahun bersama lembaga penelitian SMERU, almarhumah telah menghasilkan 12 karya ilmiah, termasuk 6 di antaranya telah dimuat di berbagai jurnal internasional. Almarhumah dikenal oleh teman-temannya, baik di dalam maupun di luar SMERU, sebagai sosok peneliti yang tekun, periang, dan suka membantu. Almarhumah juga belajar tentang bidang baru dengan cepat, terbukti dari karya-karyanya yang banyak mengulas tentang persoalan sosial-ekonomi, meskipun latar belakang pendidikan almarhumah adalah bidang matematika.

Kepergian Wina merupakan kehilangan besar tidak hanya buat Lembaga Penelitian SMERU karena salah satu peneliti handalnya telah pergi, akan tetapi juga untuk masyarakat peneliti dan akademis, khususnya bagi mereka yang menggumuli berbagai aspek terkait dengan kemiskinan dan perlindungan sosial yang jumlahnya memang belum banyak di Indonesia. Wina, selamat beristirahat dengan damai dan kami akan selalu mengenangmu. ■

Pemakaman Wina dilaksanakan di Salatiga pada 25 Mei 2008.

*Wina's funeral took place in Salatiga on 25 May 2008.*



Novita/SMERU

*The final workshop at which Wina represented SMERU was the 'Research and Methodology Workshop on Social Protection in Asia' which was held by IDS Sussex and BRAC in Dhaka, Bangladesh from 29 April–1 May 2008. Some weeks after this workshop, on May 23, Wina took her last breath while undergoing a spinal operation in a hospital in Jakarta.*

### Closing

*This brief profile of the late Wina shows that during her lifetime Wina was a productive researcher. In the 8 years she spent with The SMERU Research Institute, Wina produced 12 scientific reports, 6 of which were published in refereed international journals. Wina was known, both by her friends from SMERU and those outside the office, as a diligent and jovial researcher who loved to help. Wina also learned about new areas quickly, as proven from her many reports which cover socioeconomic problems, despite her educational background being in mathematics.*

*Wina's departure is a big loss not only for The SMERU Research Institute because one of its highly capable researchers has gone, but also for the research and academic community at large, especially for those limited few who are involved in various aspects related to poverty and social protection in Indonesia. Wina, rest in peace, we will always remember you. ■*